



**KEBIJAKAN INDONESIA MEMBELI MINYAK DARI
SONANGOL EP - ANGOLA**

**INDONESIA POLICY BUY OIL FROM SONANGOL EP-
ANGOLA**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**RISALATUL UMAMI
NIM 110910101027**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Hairiyah dan Ayah Ahrori, kakak sayaikhu yahya dan adik Rizal Faiz Mahtum;
2. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia cabang Jember, yang tak henti-hentinya mengingatkan saya untuk melanjutkan studi yang sulit berakhir;
3. UKM F Wisma Gita Fisip, UKM O Sepakbola Universitas Jember, Federasi Futsal Jatim, Jember United FC, PLGI, KONI Jember dan Klub Futsal Putri MFA Bandung;
4. Teman-teman atlet Futsal, Basket, dan Parahlayang yang selalu mengingatkan saya;
5. Teman-teman hubungan internasional angkatan 2011;
6. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan per guruan tinggi;
7. Almamater saya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

الناس أنفعهم للناسخير

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain¹



¹HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni. Disahihkan Al Albani dalam As-Silsilah As-Shahihah

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Risalatul Umami

NIM : 110910101027

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: *Kebijakan Indonesia Membeli Minyak dari Sonangol EP- Angola* adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Mei 2017

Yang menyatakan,

Risalatul Umami

NIM 110910101027

SKRIPSI

**KEBIJAKAN INDONESIA MEMBELI MINYAK DARI
SONANGOL EP - ANGOLA**

**INDONESIA POLICY BUY OIL FROM SONANGOL EP -
ANGOLA**

Oleh

**RISALATUL UMAMI
NIM 110910101027**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Djoko Susilo, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Indonesia Membeli Minyak dari Sonangol EP - Angola ” telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18 Mei 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember

Tim Penguji :
Ketua

Dr. Sunardi Purwaatmoko, MIS
NIP : 196010151989031002

Sekretaris I

Sekretaris II

Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A
NIP: 197611122003121002

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP: 195908311989021001

Anggota I

Anggota II

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si
NIP: 196105151988021001

Agus Trihartono, S.Sos, M.A, Pd.D
NIP: 196908151995121001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

“Kebijakan Indonesia Membeli Minyak dari Sonangol EP - Angola”:
Risalatul Umami, 110910101027; 2016; 107 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pembelian minyak Indonesia langsung dari Sonangol EP Angola yang notabennya merupakan perusahaan nasional yang menangani minyak di negara Angola. Pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola tersebut juga merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo 10 hari pasca pelantikannya sebagai Presiden. Dengan diadakannya pembelian minyak dari Sonangol EP Angola tersebut Indonesia diharapkan mampu menyetabilkan harga minyak yang beredar dalam negeri yang sebelumnya mengalami kelangkaan BBM, serta mampu menghemat anggaran subsidi bahan bakar minyak yang membengkak.

Pembelian minyak Indonesia dari Angola pada dasarnya menjadi bahan pergunjangan di antara para ilmuwan, politisi dan pengamat minyak di Indonesia karena dinilai terlalu cepat memutuskan pembelian minyak dari Sonangol EP-Angola. Dua faktor yang menjadi argumen utama dalam karya tulis ilmiah ini adalah opini publik, faktor politik yang meliputi transisi politik, pembubaran PT Petral dan penghematan anggaran BBM juga faktor Keterlibatan Surya Paloh dalam kebijakan ini juga dinilai sangat mempengaruhi diambilnya keputusan pembelian minyak dari Sonangol EP Angola yang masih mendapat pengaruh dari pemerintahan Angola, Sonangol EP serta Sonangol Internasional Limited yang berkaitan langsung dengan PT Surya Energy milik Surya Paloh. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa Indonesia mengambil kebijakan membeli minyak dari Sonangol EP – Angola.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut meliputi teknik pengumpulan data. Teknik Pengumpulan data

adalah studi pustaka (*Library Research*) untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut kemudian di analisis menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengambil kebijakan dari Sonangol EP-Angola adalah untuk menghemat anggaran bahan bakar minyak dan menjalin kerjasama bilateral Indonesia dan Angola.



PRAKATA

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji syukur kepada ALLAH SWT, atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “*Kebijakan Indonesia Membeli Minyak dari Sonangol EP - Angola*”. Penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam proses penulisan, sehingga diperlukan masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

- :
1. Honest Dody Molasy, S.Sos, M.selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan, dorongan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
 2. Drs. Djoko Susilo, M.Si selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
 3. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
 4. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional.
 5. Seluruh Dosen, staf, dan karyawan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan segenap ilmu dan pengetahuannya selama penulis belajar di Jurusan ini;
 6. Kedua orang tua yang telah sabar dan pengertian menunggu penulis menyelesaikan skripsi ini;
 7. Teman-teman HI 2011;
 8. Seluruh pihak yang telah menjadi inspirasi dan memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih banyak atas bantuan dan dukungan selama ini. Penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan

skripsi ini, dan tidak berlebihan kiranya apabila penulis selipkan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 18 Mei 2017

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	8
1.2.1 Batasan Materi	8
1.2.2 Batasan Waktu	9
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kerangka Dasar Pemikiran.....	10
1.5.1 Faktor Internal.....	13
1.5.1 Faktor Eksternal.....	14
1.6 Argumen Utama	Error! Bookmark not defined.
1.7 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.7.2 Teknik Analisis Data	18
BAB 2. Perkembangan Minyak Dan Gas Di Indonesia.....	19
2.1. Sejarah Minyak Dan Gas Di Indonesia	19
2.2 Sistematika Tata Kelola Migas di Indonesia	26

2.3 Tata Kelola Produksi dan Konsumsi Minyak Diindonesia	33
BAB III. Sonangol EP Angola	40
3.1 Sejarah Angola	40
3.2 Perusahaan Minyak Negara Angola Sonangol EP	Error! Bookmark not defined.
3.3 Hubungan Kerjasama Angola dan Indonesia	53
BAB 4. Alasan Pembelian Minyak Indonesia Dari Sonangol Ep Angola	61
4.1 Faktor Internal	62
4.1.1 Opini Publik	63
4.1.2 Proses Politik	76
4.1.2.1 Politik	78
4.1.2.2 Pembekuan PT Pertamina Trading Limited (Ltd)	80
4.1.2.3 Penghematan Anggaran BBM	85
4.2 Faktor Eksternal	90
BAB V KESIMPULAN	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107

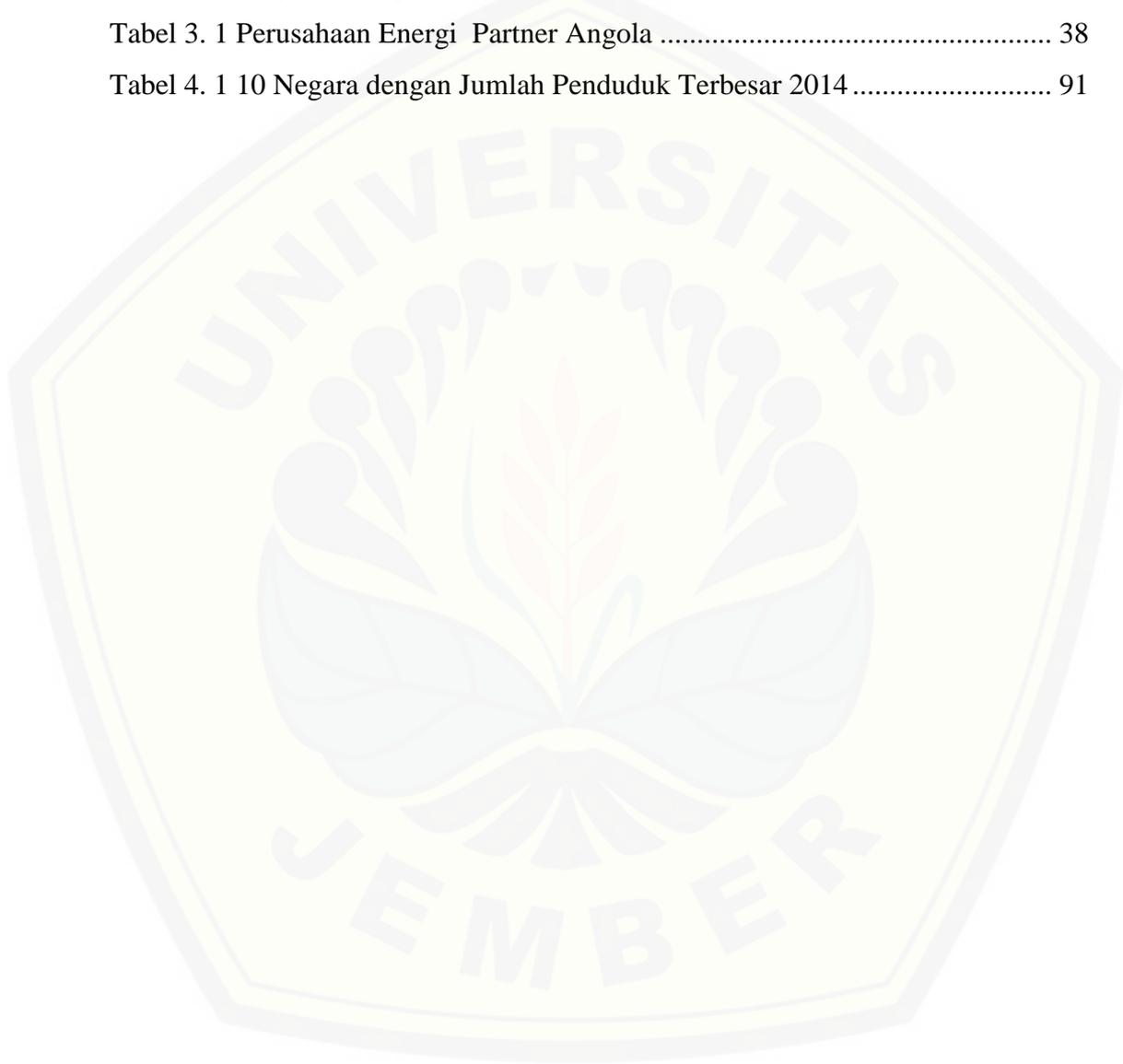
Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Perbandingan Konsumsi dan Impor minyak negara-negara ASEAN . 34
Gambar 3. 1 Produksi minyak Angola per tahun.....45



Daftar Tabel

Tabel 1 Decision Making theory Richard C Snyder	14
Tabel 2. 1 Produksi Minyak Bumi Indonesia.....	29
Tabel 2. 2 Konsumsi Minyak Indonesia	34
Tabel 2. 3 Proyeksi Pengalihan Minyak Ke Sumberdaya lain.....	35
Tabel 3. 1 Perusahaan Energi Partner Angola	38
Tabel 4. 1 10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar 2014	91



Daftar Singkatan

CNOOC	: <i>China National Offshore Oil Corporation</i>
SINOPEC	: <i>China National Petrochemical Corporation</i>
CNPC	: <i>China National Petroleum Corporation</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
PDB	: <i>Produk Domestik Bruto</i>
IEA	: <i>International Energy Administration</i>
EIA	: <i>Energy International Administration</i>
NDRC	: <i>The National Development and Reform Commission</i>
MPLA	: <i>Movimento Popular de Libertacao de Angola</i>
UNITA	: <i>Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola</i>
FNLA	: <i>Frente Nacional para Libertacao de Angola</i>
SONANGOL	: <i>Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola</i>
EP	: <i>European Portuguese</i>
NOC	: <i>National Oil Company</i>
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
ANIP	: <i>Angola National Agency for Private Investment</i>
PES	: <i>Pertamina Energy Service</i>
PETRAL	: <i>Pertamina Trading Limited</i>
ENI	: <i>Ente Nazionale Idrocarbur</i>
PERTAMINA	: PERTAMIN bergabung dengan PERMINA

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia termasuk negara kepulauan karena memiliki ribuan pulau yang tersebar dalam gugusan pulau besar maupun kecil. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulau yang berada di Indonesia adalah 17.504 pulau. Yang mana dalam pulau – pulau tersebut memiliki berbagai macam adat dan budaya serta keberagaman sumber daya alam.

Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia membuat Pemerintah Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara termasuk sumber daya alam yang berupa minyak dan gas. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang berfungsi untuk memproduksi berbagai kebutuhan manusia baik barang maupun material². Kebutuhan akan minyak tersebut juga merupakan hal yang wajib bagi dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri untuk menjalankan pengelolaan hasil minyak dianggap perlu untuk menambah pendapatan Negara Indonesia. Negara Indonesia juga memiliki perusahaan Negara yang mengelola tentang hasil minyak dan gas negara di seluruh Indonesia. Perusahaan minyak dan gas tersebut adalah PT Pertamina (Persero). PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan milik negara yang bertugas untuk mengelola hasil minyak dan gas di Indonesia serta memenuhi kebutuhan minyak dan gas di Indonesia. Dengan adanya PT Pertamina (Persero) di Indonesia pada awalnya di harapkan mampu memperkokoh stabilitas pengelolaan gas dan minyak di Indonesia. Dengan berdirinya perusahaan milik negara tersebut yaitu PT Pertamina (Persero) Pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 8 Pada tahun 1971 yang berisi tentang

²Guerriero V. et al. 2010 "Quantifying uncertainties in multi-scale studies of fractured reservoir analogues: Implemented statistical analysis of scan line data from carbonate rocks". *Journal of Structural Geology* (Elsevier) 32 (9): 1271–1278.

pengaturan PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya perusahaan BUMN Indonesia yang memiliki peran dalam pengeksplorasian dan pengusahaan minyak di Indonesia. Pengusahaan minyak dan gas yang menghasilkan minyak dan gas dari berbagai macam lading minyak yang berada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga hasil minyak dan gas mampu dikelola sampai menjadi berbagai macam produk yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Wilayah Indonesia.

PT Pertamina (Persero) selaku pengelola minyak dan gas di Indonesia mengambil peran dalam setiap transaksi pengelolaan minyak di Indonesia baik dalam dan luar negeri. PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan BUMN Indonesia ikut ambil bagian dalam setiap pembelian minyak yang dilakukan Indonesia baik ekspor maupun impor. Indonesia melalui PT. Pertamina (persero) dalam hal ini sebagai perusahaan yang membeli persediaan minyak Negara. Pembelian minyak yang di pakai oleh PT Pertamina (Persero) dibeli dari berbagai produsen minyak dunia salah satunya PT Petral yang posisinya sendiri sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero). PT Petral yang posisinya merupakan anak perusahaan PT. Pertamina yang berkedudukan di Singapore. PT Petral yang awalnya menjadi pemasok minyak mentah Indonesia dan kemudian digantikan dengan Sonangol EP membuat Pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP memiliki berbagai macam pro kontra dari reaksi pembelian. Isu yang beredar dimana PT Petral melakukan pelanggaran yang merugikan Negara Indonesia. Kerugian dari Negara Indonesia sempat ditanggapi oleh PT Petral dengan sering diundangnya sejumlah beberapa pihak untuk melihat langsung tender yang dilakukan oleh PT Petral. Pertemuan itupun dihadiri oleh Anggota DPR, wartawan media cetak dan elektronik bahkan lembaga swadaya masyarakat. PT Petral tidak dituding salah atau melanggar proses pengadaan minyak yang dapat merugikan Negara karena dianggap terdapat campur tangan Mafia.

Mafia minyak merupakan sebenarnya bukan di bidang impor Bahan Bakar Minyak. Akan tetapi, mafia minyak adalah sekelompok atau individu yang

mengambil jatah minyak bersubsidi untuk kemudian dijual lagi kepada pihak swasta. Contoh kasus mafia minyak yang terjadi selama ini adalah satu badan usaha milik negara (BUMN) mendapatkan jatah solar bersubsidi 100.000 ton. Jatah minyak tersebut nantinya akan diambil oleh oknum 30% untuk dijual kepada perusahaan swasta melalui sindikat mafia minyak dengan harga minyak yang bersubsidi. Lalu pihak mafia menjualnya kepada beberapa perusahaan tambang dan lain-lain dengan harga bahan bakar minyak industri.

Indonesia akan mendapatkan kerugian apabila benar terjadi jual beli minyak yang dilakukan oleh mafia minyak. Transisi pemerintahan yang terjadi antara presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo pada tahun 2014 menjadi momen penting dalam sebuah kebijakan yang berkaitan dengan Sumber daya alam Indonesia khususnya minyak. Minyak sendiri disebut di jual oleh mafia migas bukan karena ekspor import nya. Tetapi penjelasan tentang mafia minyak dan gas berkaitan dengan penjualan dalam negeri yang mana penjualan minyak bersubsidi sebagai jatah minyak dan gas milik masyarakat maupun perusahaan-perusahaan badan usaha milik Negara dijual ke pihak swasta dengan harga yang lebih rendah. Sehingga, nilai subsidi yang awalnya untuk meringankan nilai pembelian minyak untuk masyarakat dengan ekonomi skala menengah ke bawah menjadi tidak tepat sasaran.

Jumlah harga subsidi bahan bakar minyak yang di anggap tidak tepat sasaran dalam penemuan data yang ada menyebutkan bahwa jumlah kerugian Indonesia sekitar 180 miliar perhari. Relokasi subsidi bahan bakar minyak yang tidak tepat menjadi penyebab tersendiri dalam keterkaitan mafia minyak yang ada di Indonesia. Badan usaha milik Negara. Mafia minyak dan gas mendapat keuntungan dengan memanfaatkan subsidi Pemerintah Indonesia dalam sector minyak yang mana hal tersebut sangat merugikan negara³.

³PT Pertamina (Persero) : Renewable spirit, Majalah Hilir BPH Migas edisi 8 , 2014.
www.bphmigas.go.id/en/magazine/doc_view/255-majalah-hilir-edisi-8 di akses 20 februari 2016

Pemerintah Republik Indonesia mempunyai realisasi alokasi bahan bakar minyak subsidi dengan pembagian per sector subsidi bahan bakar minyak. Pada tahun 2013 tercatat transportasi darat dimana eks SPBU Premium mempunyai jumlah 29.146.000 KL dan solar 13, 620.178 KL. Terdapat pula beberapa badan usaha milik Negara yang memiliki subsidi bahan bakar minyak lain seperti : PT Pelni 201.000 KL solar, ASDP 98.288 KL solar, PT Kereta Api Indonesia (KAI) 212.000 KL solar, kapal perintis 37.013 KL Solar, nelayan dan usaha kecil menengah hanya 1.711.000 KL solar serta minyak tanah pada daerah-daerah yang belum terkonversi atau pedalaman yang masih menggunakan bahan bakar minyak tanah sebesar 1.100.000 KL Data di atas merupakan angka realisas alokasi bahan bakar minyak bersubsidi yang dibuat tahun 2013 menuju 2014.⁴

Pada bulan oktober 2014 pembahasan tentang mafia minyak di beberapa berita nasional tidak bisa terhindarkan. Keadaan pemerintahan yang berada pada masa transisi pemerintahan dari presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo pada saat itu serta adanya keputusan pembelian minyak dari Sonangol EP 10 hari setelah joko widodo dilantik Pada tanggal 31 Oktober 2014 sangat banyak di perbincangkan. Kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP – Angola merupakan salah satu pembahasan ekonomi politik internasional yang mulai memanas di Indonesia pada oktober 2014. Pada dasarnya, pembahasan isu ini mulai dibicarakan oleh para pakar politik, akademisi sejak sebelum pembelian yakni bulan agustus sampai tanggal penandatanganan kerjasama pembelian minyak dari Sonangol EP Angola hingga sampai tahun 2015. Penandatanganan pembelian minyak tersebut diwakili oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Fincente yang dilaksanakan di istana negara Republik Indonesia pada tanggal 31 oktober 2014.

Indonesia telah menandatangani pembelian minyak dari Sonangol EP – Angola. Berbagai opini publik bermunculan. Pakar ekonomi menganggap bahwa proses pembelian minyak tersebut sangatlah mencurigakan karena dinilai kurang

⁴ <http://m.inilah.com/news/detail/2117305/mafia-minyak-justru-ada-di-bbm-subsidi> diakses 17 januari 2016

transparan oleh berbagai pakar dan akademisi ekonomi Indonesia. Uchok Sky Khadafi yang merupakan Koordinator Forum Transparansi Anggaran (FITRA) menjadi salah satu orang yang mengkritisi kebijakan tersebut. Ucok mengatakan bahwa pembelian minyak dari Sonangol adalah bagian dari pencitraan, dimana pemerintahan Joko Widodo hanya ingin menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo bisa mendapatkan minyak mentah dengan harga murah dan diskon harga sebesar 15 persen setiap barel dari harga pasar internasional yang berlaku saat Pertamina membeli minyak ke Sonangol EP Angola. Indonesia melalui PT Pertamina (persero) telah mengajukan surat diskon kepada pihak Sonangol EP-Angola dimana permohonan diskon tersebut ternyata tidak bisa terlaksana⁵. Tidak adanya diskon seperti yang telah diungkapkan oleh menteri ESDM Sudirman Said tidak bisa tercapai karena disinyalir sebagai bentuk ke Anggotaan Sonangol EP Angola ke dalam Negara-negara penghasil minyak dunia OPEC yang harus menyelaraskan harga minyak dunia yang dijualnya.

Diskon pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola pernah dijanjikan oleh pihak Sonangol EP Angola untuk mendapatkan potongan harga pembelian minyak. Diskon kerjasama pembelian minyak tersebut akhirnya yang menjadi daya tarik Indonesia melakukan kerjasama pembelian minyak dari Sonangol EP Angola karena dengan adanya kerjasama yang terjalin dalam pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola Indonesia bisa menghemat anggaran belanja negara. Namun, diskon tersebut tidak terlaksana dan Indonesia justru tidak mendapatkan potongan sama sekali sementara harga minyak mentah dunia mulai turun dan pembelian itu dianggap kurang efisien dan hanya bernilai politis karena jika di telusuri lebih lanjut Sonangol EP hanya memiliki sedikit saham dalam perusahaan pada Sonangol EP Angola dan sebagian besar saham dimiliki oleh pihak lain antara lain, Chevron, Exxon dan Sonangol Internasional Holding.

⁵Erlangga Djumena. 2014. Pertamina dan Sonangol Belum Sepakati Harga Minyak <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/12/03/124913726/Pertamina.dan.Sonangol.Belum.Sepakati.Harga.Minyak> di akses 28 September 2015

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria berpendapat, bahwa kerjasama pembelian minyak dari Angola masih perlu dikaji lebih jauh, karena dianggap tidak menguntungkan bagi perekonomian negara. Sofyano berpendapat bahwa Chevron dan Exxon ikut bekerjasama dengan Sonangol EP Angola. Sofyano Zakaria mengutarakan hal tersebut berdasarkan pada Data Energy Intelligence Research sebuah badan penelitian internasional yang menghimpun data tentang perusahaan minyak dan gas yang ada di Negara-negara seluruh dunia dimana komposisi kepemilikan saham Sonangol EP lebih kecil dibanding perusahaan minyak asing yang beroperasi di Angola seperti Chevron dan Exxon⁶.

Dalam uraian di atas terlihat jelas bahwa sebenarnya kepemilikan saham asing lebih dominan menguasai saham dari Sonangol EP Angola yang notabennya merupakan perusahaan BUMN milik negara Angola. Jika dilihat lebih jauh sebenarnya issue ini sangatlah menarik untuk diteliti karena terdapat kerjasama politik tersembunyi. Banyak pengamat ekonomi menganggap kebijakan ini sangat bertolak belakang dengan keuntungan Negara karena tidak menghemat Anggaran Negara dalam pembelian minyak. Akan tetapi, meski kebijakan ini banyak yang mengkritisi karena bertolak belakang dengan penghematan anggaran negara, kebijakan pembelian minyak tersebut justru tetap di ambil oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan menteri ESDM Sudirman Said.

Menanggapi kasus pembelian minyak ke Angola terdapat berbagai tulisan, argumen serta kritik dalam kebijakan Presiden Joko Widodo. Hal itu disebabkan telah terjadinya penandatanganan Kebijakan Pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola yang dilakukan oleh Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Fincente di Istana Merdeka, Jumat 31 Oktober 2014. Karena dengan adanya kerjasama pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola,

⁶Mulkani, 2014. Sofyano Zakaria: Tidak Percaya Beli Minyak "Murah" Dari Angola <http://Indonesian-petroenergy.com/headline-Indonesianpetroenergy.php?id=490> di akses 28 september 2015.

muncullah suatu ide dalam kepenulisan ini dimana Indonesia Mengambil Kebijakan Membeli minyak Dari Sonangol EP Angola. Dimana perang opini serta perbedaan pendapat yang ada di berbagai media baik televisi ataupun cetak bahkan beberapa tulisan ilmiah yang mengaitkan tentang reformasi kebijakan minyak yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla menjadi menarik untuk di teliti. Penelitian lain dalam tema karya tulis ini juga dilakukan oleh Patrick Heller dan Popy Ismalina sebagai resources dari Natural Resource Governance Institute membahas tentang :

“Pertimbangan-pertimbangan penting bagi Pemerintah baru Indonesia dalam menyusun agenda kerja untuk pengelolaan sumber daya alam.”⁷

Tulisan tersebut membahas tentang bagaimana gambaran umum tentang pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla tentang pengelolaan sumber daya alam. Pertimbangan tersebut sering kali dikaitkan dengan berbagai sudut pandang pengetahuan. Terdapat berbagai macam argument yang juga bermunculan sehingga sebuah kebijakan tentang pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola ini nantinya diharapkan mampu membuka keran diplomasi baru dalam sektor kerjasama ekonomi yang belum terbangun. Indonesia sendiri mengawali perkenalan Dimplomasi dengan Angola sejak tahun 2001 dan belum pernah menjalani kerjasama ekonomi sampai tahun 2014. Sehingga, pembahasan tentang Indonesia dan Angola ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut.

Sonangol EP Angola yang merupakan perusahaan Negara Angola dalam bidang pengadaan minyak dan gas banyak dibiayai oleh investor asing dalam pengelolaanya dan investor terbesarnya yakni Sonangol Internasional Holding dan berbagai perusahaan – perusahaan asal China. Membahas tentang China yang memiliki pengaruh dengan Angola. membuat banyak hal lain seperti latar belakang kerjasama dan siapa yang menjadi penggerak kebijakan pembelian

⁷ Patrick Heller, dan Popy Ismalina, 2014. Reformasi Sistem Tata Kelola Sektor Migas : Pertimbangan untuk Pemerintah Jokowi - JKProgram Hukum dan Ekonomi dari *the Natural Resource Governance Institute*.

minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola yang perlu diteliti dan menarik untuk di bahas dalam kelanjutan tulisan ini. Pembahasan tentang bagaimana Sonangol berdiri dan tetap bertahan atau ada keterkaitan China dalam kebijakan pengambilan keputusan pembelian minyak dari Sonangol EP Angola. yang masing-masing memiliki keterkaitan yang sangat penting hingga perlu di telaah lebih jauh keberadaan kebijakan pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola yang menjadi satu kesatuan dalam pembahasan dari bab ke bab yang akan melengkapi penulisan karya tulis ilmiah ini.

Dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas serta berbagai sumber yang telah dikemukakan dalam tulisan kali ini, membuat suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas lebih jauh. Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pembelian minyak yang dilakukan Pemerintah Indonesia dari Sonangol EP – Angola dengan judul :

“Kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP- Angola”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah pembatasan ruang lingkup pembahasan menjadi sangat penting. Pembatasan perlu dilakukan agar permasalahan yang dibahas tidak berkembang luas dan keluar dari topik permasalahan. Ruang lingkup dalam penulisan karya tulis ilmiah ini terdiri dari dua bagian yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan untuk memfokuskan kajian permasalahan yang diteliti. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis akan memfokuskan pada pengambilan kebijakan pembelian minyak yang dilakukan oleh presiden Indonesia Joko Widodo pada perusahaan BUMN milik negara Angola yakni

Sonangol EP, serta latar belakang pengambilan keputusan tersebut yang pada hal ini peraturan migas dan peraturan BP Migas masih dibawah naungan BUMN Indonesia yakni PT Pertamina (Persero) tanpa melalui perantara PT Petral yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu yaitu rentang waktu dari terjadinya peristiwa yang dijadikan permasalahan dalam karya tulis ilmiah. Dalam menganalisis kebijakan Pemerintah Indonesia dalam membeli minyak ke Sonangol EP Angola penulis menggunakan batasan waktu 2013 sampai 2015 dimana latar belakang serta dampak dari kebijakan itu sudah bisa di analisis dimana Sudirman Said selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan megevaluasi hasil dari kesepakatan pembelian minyak mentah langsung antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan minyak asal Angola, Sonangol EP yang telah diteken Oktober 2014 lalu. Sudirman sendiri menegaskan, keputusan untuk membeli minyak langsung dari Sonangol didasarkan pada potensi keuntungan yang akan diterima negara karena tidak melewati mekanisme perantara.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam sebuah karya tulis ilmiah penulis dituntut untuk dapat memaparkan dan menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat. Suatu penelitian akan berawal dari suatu permasalahan yang kemudian perlu dicari jawabannya. Dengan demikian maka rumusan masalah memiliki kedudukan yang penting sebagai fokus penelitian dari permasalahan yang diangkat dan awal dari penelitan terebut dibuat.

Berdasarkan penjabaran mengenai permasalahan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang digunakan oleh penulis sebagai awal dan fokus penelitian karya tulis ilmiah ini adalah:

“ Mengapa Indonesia mengambil Kebijakan membeli minyak dari Sonangol EP- Angola?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membeli minyak ke Sonangol EP, Angola.

1.5 Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menganalisis fenomena yang diangkat dalam karya tulis ilmiah ini penulis perlu menggunakan kerangka pemikiran. Penggunaan teori dan konsep dalam penulisan karya tulis ilmiah memiliki kedudukan yang penting. Menyusun teori dan konsep dapat dikatakan sebagai cara yang sistematis untuk menggabungkan fenomena dan ilmu pengetahuan.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan untuk membedah dan menganalisis karya ilmiah ini adalah *Decision making* atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perilaku atau sikap dan tindakan yang dilakukan suatu negara. Tindakan atau sikap suatu negara merupakan bentuk keputusan yang dihasilkan dari proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan kebijakan dapat dianalisa dengan *decision making process*.

Para ilmuwan banyak yang mengemukakan tentang *decision making process*. Salah satu ilmuwan tersebut adalah Richard C Snyder yang memaparkan bahwa "*state action in the action taken by those acting in the name of the state*"⁸ dimana ⁹Snyder memaparkan bahwa Negara adalah segala kegiatan atau keputusan yang di ambil dari kepala Negara adalah atas nama Negara.

⁸ Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin (eds), *Foreign Policy Decision-Making : An Approach to the Study of International Politics*, The Free Press, New York, 1962, hal 200

Teori kebijakan luar negeri Snyder yang sering dikenal adalah *decision making process* dimana pendekatan eksternal dan internal menjadi acuannya.. Sesuai dengan namanya, pengambilan keputusan dengan menggunakan teori eksternal dan internal setting tersebut adalah sebuah teori dimana faktor – faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan tersebut baik dari internal ataupun eksternal. Faktor internal adalah keadaan dalam negeri dan keadaan pemerintahan Indonesia pada saat di ambilnya kebijakan. Dalam pandangan Snyder, proses pembuatan keputusan dimaksudkan untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak.

Suatu hal yang penting juga adalah untuk mengetahui apakah perbedaan proses pembuatan keputusan juga akan menghasilkan keputusan yang juga berbeda dan apakah keterlibatan individu atau kelompok juga dapat mempengaruhi suatu hasil keputusan.

Dalam teori ini yakni *Decision making process* Richard Snyder mengajukan suatu prosedur perumusan politik luar negeri yang sifatnya lebih sederhana. Snyder mengemukakan bahwa berbagai *setting* internal dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, Peranan kepemimpinan, persepsi dan sistem kepercayaan adat para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan Mereka. Ada beberapa faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Penelitian Snyder juga mempertimbangkan karakteristik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis atau beresiko¹⁰.

Dalam teori ini terdapat prosedur yang dikemukakan oleh Snyder faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan (*decision makers*). Kelebihan dari

¹⁰ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, 2005, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 64

model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari politik luar negeri itu sendiri. Maka dari itu, faktor-faktor yang paling penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri adalah¹¹ :

1. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang dianut), merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut diambil.
2. Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi), untuk mengetahui sumber sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik dan kebijakan luar negeri.
3. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri, menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.

Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam krisis atau tidak dalam krisis suatu keputusan tersebut diambil. Dengan demikian akan banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi suatu aktor. Kerangka variabel yang dimaksud adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang melekat pada aktor, termasuk juga struktur sosial dan perilaku. Variabel-variabel tersebut dibagi menjadi beberapa poin, yang membuat teori tersebut menjadi lebih kompleks (lihat Tabel 1).

Pada awalnya, proses pengambilan keputusan luar negeri juga sering diidentikan dengan mekanisme yang terjadi dalam sistem politik yang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, termasuk juga mempengaruhi lingkungan dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena itu, proses politik luar negeri juga dapat dilakukan dengan menggunakan Faktor eksternal dan internal Snyder dimana dalam faktor-faktor tersebut di perinci lagi dengan beberapa pendekatan antara lain :

¹¹ Ibid hal65

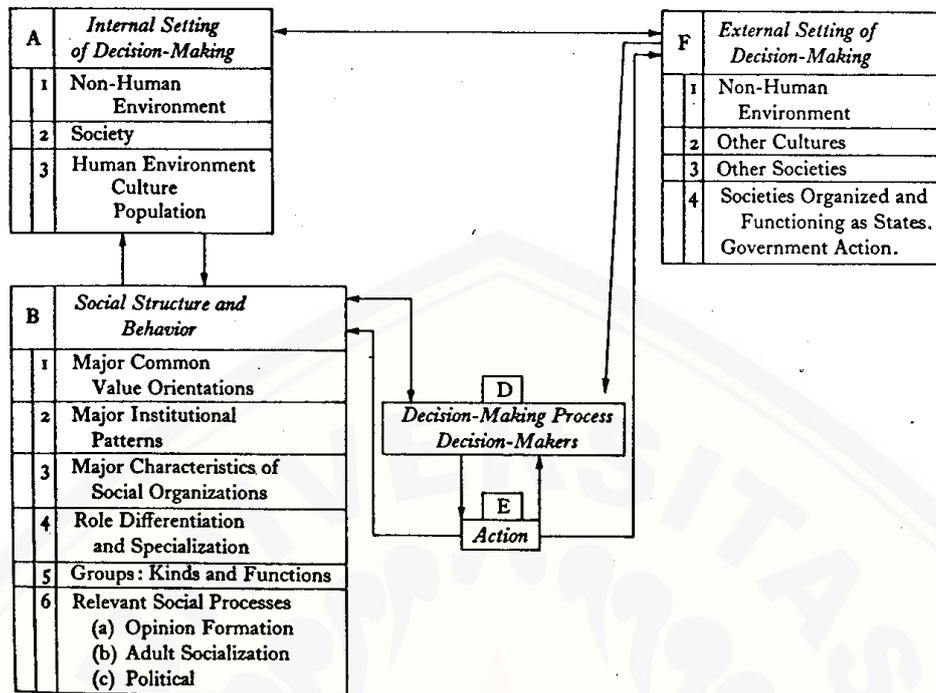


Figure 1. State "X" as Actor in a Situation*
(Situation is comprised of a combination of selectively relevant factors in the external and internal setting as interpreted by the decision-makers.)

Tabel 1 Decision Making theory Richard C Snyder, H. W. Bruck dan Burton Sapin¹²

1.5.1 Faktor Internal.

Dalam sebuah kebijakan akan terdapat sebuah faktor dalam mempengaruhi sebuah kebijakan. Dimana, kebijakan tersebut akan mempengaruhi keadaan politik maupun ekonomi sebuah negara. Faktor internal sendiri bersifat keadaan dari dalam negara itu sendiri baik itu ekonomi ataupun politik. Dimana keadaan itu akan sangat menjadi acuan sebuah kebijakan dan mempengaruhi kebijakan itu berlangsung.

¹² Richard C Snyder, H. W. Bruck dan Burton Sapin Decision making approach to the study of internal relation hal 201.

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan dua faktor internal yang dirasa sangat mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP Angola. Adapun faktor tersebut adalah :

1.5.1.1 Opini Publik.

Dalam faktor *internal setting* terdapat tiga hal pokok yang ada pada pengaturan pengambilan kebijakan secara internal yaitu istilah lingkungan non-manusia, masyarakat, lingkungan manusia, budaya, dan populasi.

Faktor internal pada dasarnya berperan bagi suatu negara untuk menentukan sebuah kebijakan yang akan dihasilkan, karena sebelum proses perumusan kebijakan dilaksanakan suatu negara akan mempertimbangkan aspek masyarakat yaitu tuntutan masyarakat, kebudayaan atau kebiasaan dari masyarakatnya serta perilaku masyarakat itu sendiri terhadap isu yang akan dibicarakan dalam proses pembuatan kebijakan oleh para pembuat kebijakan.

Pada awalnya, proses pengambilan keputusan luar negeri juga sering diidentikan dengan mekanisme yang terjadi dalam sistem politik yang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, termasuk juga mempengaruhi lingkungan dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena itu, proses politik luar negeri juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem seperti yang dilakukan oleh David Easton. Kemudian dikembangkan oleh Jhon Lovell dengan memperkenalkan model proses ideal. Model ini dimaksudkan untuk melakukan tindakan yang ideal agar keputusan yang diambil mendekati aktual. Dengan demikian akan diperoleh gambaran proses yang dilakukan oleh sebuah sistem dalam mengambil keputusan yang aktual dan faktor penyebab keputusan itu diambil¹³. *Non human environment sendiri* dalam hal ini factor keadaanlah yang membuat Pemerintah Indonesia mengimport minyak dari Sonangol EP Angola.

Perilaku dan struktur social pada dasarnya sangat berpengaruh penting dalam sebuah kebijakan dan dalam kasus kali ini adalah *Opinion Formation* dimana

¹³ Mochtar Masoed & Collin Mac Andrew, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990. hal 3

pembentukan opini dalam pengambilan keputusan ini sangat banyak di temui di media massa mulai dari berbagai pejabat negara seperti Menteri ESDM Sudirman said, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Menurut beberapa pengamat energi salah satunya Sofyano Zakaria¹⁴.

1.5.1.2 Proses Sosial.

Internal setting of decision making pada bagian kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Baik *internal setting of decision making* maupun *external setting of decision making* merupakan faktor utama yang mempengaruhi para pembuat kebijakan dalam proses perumusan suatu kebijakan. Dalam pendekatan politik kasus ini pendekatan politik yang terjadi menjadi salah satu aspek internal dan pertimbangan sendiri bagi decision maker. Karena ketika terjadi kebijakan pembelian minyak ke Sonangol EP Angola akan muncul beberapa kebijakan lain yang di yakini menguntungkan untuk Indonesia dalam hal politik maupun ekonomi dalam hal ini kerjasama-kerjasama yang terjadi antara Indonesia dan Sonangol setelah pengambilan kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP Angola.

1.5.2 Faktor Eksternal.

Faktor eksternal merupakan faktor atau keadaan diluar negara yang mempengaruhi sebuah kebijakan yang akan dan telah berlangsung. Dimana faktor tersebut bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. dalam tulisan kali ini penulis memakai sebuah faktor eksternal yang dirasa mampu untuk mengupas lebih jauh bagaimana kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP Angola.

- Government Action.

¹⁴ <http://katadata.co.id/berita/2014/12/02/sudirman-sedang-ada-perang-opini-soal-Sonangol#sthash.GCZHj0UZ.dpbs> di akses pada tanggal 29 Februari 2016.

Government Action adalah salah satu teori dari *Eksternal setting* dimana factor ini terpengaruh oleh tindakan pemerintah dari Negara lain. *Government Action* juga merupakan factor yang mampu mempengaruhi dalam pengambilan sebuah keputusan dengan menggunakan tindakan pemerintah, atau intervensi pemerintah dari Negara lain. Dalam studi kasus ini pemerintah Angola lewat berbagai perusahaan dari china, Exxon, Chevron dan Sonangol EP serta surya Energy membuat pendekatan tersendiri terhadap terjadinya pengambilan keputusan di Indonesia dalam proses pengambilan keputusan ini ada beberapa tawaran yang di ajukan pemerintah Sonangol EP Angola salah satunya adalah dengan di buatnya kilang pengolahan minyak di Indonesia. Serta perjanjian-perjanjian lain dalam sector ekonomi yang menguntungkan Negara Indonesia dikemudian hari.

1.6 Argumen Utama

Untuk menjawab rumusan masalah skripsi ini, penulis membuat argumen utama atau hipotesis bahwa alasan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP Angola adalah dipengaruhi oleh faktor *external* dan *internal setting*. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a) Faktor Internal : Opini publik tentang pro dan kontra pembelian minyak dari Sonangol EP Angola. Dan faktor politik yang di pengaruhi oleh pergantian kekuasaan dari presiden SBY kepada Presiden Joko Widodo. Pembekuan PT Petral dan penghematan Anggaran subsidi Bahan bakar minyak yang mulai membengkak.
- b) Faktor Eksternal : kepentingan nasional yang ingin diraih oleh Indonesia dalam penghematan anggaran BBM awalnya tidak terpenuhi oleh janji diskon 15% yang di berikan oleh Sonangol. Tapi janji tersebut kemudian digantikan dengan adanya berbagai perjanjian bisnis antara China Sonangol Internasional, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Angola dan PT Surya Energy.

1.7 Metode Penelitian.

Metode penelitian memiliki peran penting dalam penyusunan karya tulis ilmiah dimana berfungsi sebagai teknik untuk mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penggunaan metode dalam suatu penelitian adalah untuk mempermudah peneliti dalam mencari, menyimpulkan dan menganalisis data sehingga dapat menghasilkan karya tulis yang mudah dipahami, tertata dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini terbagi menjadi dua yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya tulis kali ini menggunakan sumber data dimana sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁵ Berdasarkan penggolongan sumber data tersebut, peneliti lebih condong menggunakan sumber data sekunder yaitu dengan teknik penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Dengan kata lain peneliti tidak terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data sehingga untuk mendapatkan data yang valid dan objektif, maka peneliti mencari data di beberapa tempat dan pusat informasi diantaranya:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Perpustakaan Fisip Universitas Jember
3. Media Elektronik (Internet, Jurnal, Ebook)
4. Buku Koleksi Pribadi
5. Media Cetak

¹⁵ Prof. Dr. Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hal.225

1.7.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjawab permasalahan secara sistematis berdasarkan data-data. Penelitian ini menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasinya. Oleh karena itu, jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini akan lebih bersifat observasi data-data yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Jepang untuk membayar ganti rugi kepada *jugun ianfu* Korea Selatan.

Unit analisis yang penulis gunakan adalah “negara”, terkait dalam hal ini adalah Indonesia. Untuk unit eksplanasi yang penulis gunakan dalam karya tulis ini adalah Kebijakan Indonesia Membeli Minyak dari Sonangol EP- Angola.

BAB II

PERKEMBANGAN MINYAK DAN GAS DI INDONESIA.

2.1 Sejarah Minyak dan Gas di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kultur yang beragam. Dimana, kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah jumlahnya. Kekayaan yang dimiliki Indonesia sangat beragam. Salah satunya kekayaan sumberdaya alam. Dimana sumberdaya alam tersebut terdiri dari berbagai macam, mulai dari kenekaragaman flora, fauna serta sumber daya alam lain yang salah satunya adalah sumberdaya alam dalam bidang minyak dan gas. Sumberdaya alam Indonesia dibidang minyak dan gas sangatlah melimpah. Dimana, jika di telaah lebih jauh tentang bagaimana sumber daya alam Indonesia utamanya dalam bidang Minyak dan gas akan menjadi suatu pengulasan sejarah panjang perindustrian minyak dan perkembangan minyak dan gas Indonesia.

Sejarah tentang minyak dan gas di Indonesia sangatlah panjang. Dalam sejarah minyak dan gas terdapat berbagai macam fenomena yang ada didalamnya. Pada bab kali ini akan membahas tentang fenomena tersebut. Fenomena yang menjelaskan bagaimana awal kegiatan pengusahaan minyak dan gas yang ada dinegara Republik Indonesia ini dimulai. Dalam catatan berbagai sumber menyebutkan jika pengusahaan minyak dan gas pada awalnya terjadi pada masa kolonialisme dan jauh sebelum Negara Indonesia merdeka.

Kegiatan pengusahaan minyak dan gas awalnya dimulai pada tahun 1883 saat ditemukannya cadangan minyak di Desa Telaga Said Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat Sumatra Utara. Penemuan minyak tersebut awal berdirinya

berbagai macam usaha pengeboran serta pengadaan minyak di Indonesia yang masih hadir sampai saat ini¹⁶.

Penemuan minyak yang terjadi di telaga said pada tahun 1883 itu menghasilkan kesadaran pada pPemerintah Indonesia kolonial tentang pentingnya mendirikan perusahaan minyak nasional hingga gagasan mulai tumbuh dan terlaksana pada kala itu. Gagasan pendirian perusahaan minyak yang terjadi tersebut diharapkan nantinya akan membawahi kegiatan minyak dan gas yang ada di Indonesiadi Indonesia. Berbagai wacana tentang pembuatan perusahaan minyak di Indonesia akhirnya bermunculan dan terus hadir namun haltersebut baru sekedar wacana dan pembuatan perusahaan minyak di Indonesia baru bisa terwujud ketika PPemerintah Indonesia merdeka. Itupun tidak serta merta terjadi di tahun 1945 ketika Indonesia merdeka. Wacana tersebut berlanjut, hingga waktu yang cukup lama. Dan pembentukan sebuah perusahaan minyak nasional tersebut baru benar-benar terealisasi pada tanggal 10 desember 1957 dengan nama perusahaan PT Perusahaan minyak nasional PERMINA¹⁷.

Sejarah tentang perminyakan dan gas Indonesia memiliki beberapa periode sejarah minyak dan gas yang ada di Indonesia. Dimana, Penemuan minyak yang ada di telaga said itu sendiri menjadi periode pertama sejarah minyak dan gas di Indonesia. Meskipun PERMINA berdiri di bawah penguasaan Pemerintah Indonesia , namun pada kenyataannya dibawah kendali Pemerintah Penjajahan Belanda, sehingga legalitas pengadaan minyak dan gas dilakukan oleh penjajah. Perusahaan minyak internasional yang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam bentuk perjanjian konsesi. Dalam perjanjian konsesi yang terjadi, konsep penguasaan tersebut sendiri adalah kekayaan ekonomi, mineral dan sumber daya manusiaerada di tangan perusahaan minyak asing yang memegang kendali

¹⁶ <http://www.migasreview.com/post/1417062523/sejarah--bagian-1---penemuan-pertama-minyak-dan-gas-bumi-di-Indonesia.html> di akses 4 juni 2016

¹⁷ http://www.kompasiana.com/dedi.rustandi/sejarah-minyak-bumi-di-Indonesia-1_5500e407a33311a8725125ec di akses maret 2015

eksplorasi minyak Indonesia, meski Indonesia yang di eksplorasi namun pemerintah Hindia Belanda yang diuntungkan dalam penggalan eksplorasi ini dan konsesi serta eksplorasi ini terus berlangsung hingga Negara Indonesia merdeka¹⁸.

Periode kedua yang ditandai dengan munculnya mosi Moh.Hassan pada 2 Agustus 1951 serta diundangkannya Undang-Undang No 44/Prp/1960 yang berisi tentang Pertambangan. . Undang-Undang tersebut meneguhkan kembali prinsip-prinsip dalam perusahaan pertambangan minyak dan gas sebagaimana telah digariskan oleh para pendiri negara kita di dalam konstitusi.Pasal 2 Undang-Undang No 44/Prp/1960 menyebutkan

“Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara”¹⁹.”

Penjelasan tentang ketentuan – ketentuan yang tertera pada pasal tersebut menjelaskan bahwa eksplorasi mineral berada di tangan negara, hal tersebut sesuai dengan konstitusi Negara republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 6 (1) menyebutkan :

“Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan”²⁰.”

Ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai dengan pengeksplorasian pertambangan yang dilakukan oleh negara, sedangkan hak eksplorasi diberikan pada kontraktor rekanan dari perusahaan-perusahaan yang telah bekerjasama dengan negara. Pergantian sistem kontrak eksplorasi minyak atau konsesi yang berlaku di Indonesia kurang berjalan dengan baik, kurangnya keterlibatan tentang tawar menawar antara perusahaan-perusahaan minyak asing dalam

¹⁸ <http://www.juragansolar.com/sejarah-minyak-pertama-di-Indonesia/>

¹⁹ esdm.go.id/berita/56.../5071-akselerasi-tatakelola-migas-nasional-1.htmdi akses juli 2016.

²⁰ ibid

pengeksplorasian minyak yang terjadi pada saat itu juga menjadi faktor tidak berkembangnya eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. Hingga pada tahun 1963 sistem kontrak atau yang disebut konsesi selama ini diganti dengan kontrak karya dengan perusahaan ternama yaitu PT Caltex Pacific Indonesia, PT Stanvac Indonesia dan PT Shell Indonesia. Berdasarkan konsep kontrak karya yang telah di sepakati berisi tentang kewenangan penuh pihak kontraktor atas kegiatan eksplorasi minyak dan gas tanpa adanya unsur pengendalian dari pihak negara karena posisi negara hanyalah sebagai pemilik saham yang berhak menerima pembagian keuntungan hasil eksplorasi dan penjualan minyak. Sehingga, kewenangan untuk mengontrol yang dimiliki oleh Negara Indonesia tidak ada karena terbatas pada kerjasama system kontrak yang telah ada. Dengan sistem kontrak karya Indonesia juga hanya berhak untuk mendapatkan nilai eksplorasi pertambangan saja karena hak ekonomi dan pengeksplorasian pertambangan tidak bisa di kontrol atau masih di kuasai oleh perusahaan-perusahaan asing.

PERMINA sendiri melakukan kerjasama dengan PERTAMIN dan menggabungkan perusahaan dengan PERTAMIN menjadi PERTAMINA pada 1968. Untuk memperkuat kekuatan Pertamina sebagai pengelola minyak dan gas bumi milik Negara di terbitkan undang-undang No 8 tahun 1971, yang menempatkan PERTAMINA sebagai perusahaan minyak milik Negara. Berdasarkan Undang-undang ini, semua perusahaan minyak yang hendak menjalankan usaha di Indonesia wajib bekerjasama dengan PERTAMINA. Karena itu, PERTAMINA sendiri memainkan peran ganda yakni :

1. Regulator bagi mitra yang menjalin kerjasama melalui mekanisme yang ditawarkan oleh PERTAMINA. Perombakan tata kelola migas yang ada di Indonesia juga terjadi pada tahun 2000 dimana perubahan regulasi sejalan dengan industri migas didalam negeri. Pemerintah menerbitkan undang-undang minyak dan gas bumi No 22 tahun 2001.
2. Menjadi aktor dalam penerapan undang-undang tersebut ²¹.

²¹www.resourcegovernance.org/sites/.../nrgi_reformasi-sistem_bahasa.pdf

Periode ketiga pada tahun 1966, merupakan fase bagi bangsa Indonesia menerapkan falsafah penguasaan minyak dan gas yang ada dalam konstitusi dengan di tandatanganinya kontrak minyak yang di sebut sharing produk hasil kerjasama dengan Independent Indonesia American Petroleum Company (IIAPCO) yang terjadi pada bulan Agustus 1966. Dalam konsep kontrak hasil peoduksi tersebut perusahaan negara lebih leluasa dan lebih mempunyai kendali atas pengeksplorasiaan yang ada. bahkan, perusahaan negara berhak melakukan pengawasan manajemen dari hulu ke hilir dalam proses pengeksplorasian minyak dan gas yang terjadi di Indonesia. Terbalik dengan kontrak karya posisi kontraktor hanya berhak memiliki bagi hasil dari hasil penjualan eksplorasi minyak yang telah dilakukan. Dengan adanya pembaharuan undang – undang tersebut pertambangan dan mineral kembali ke tangan eksplorasian Negara Indonesia dan mampu mendapatkan hak ekonomi lebih dengan adanya pembaharuan undang-undang minyak dan gas tersebut.

Periode keempat terjadi ketika dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 22 pada Tahun 2001 yang berisi tentang eksplorasi minyak dan gas yang menjelaskan tentang²²:

1. Keberadaan minyak dan gas sebagai salah satu sumber daya alam yang tak terbarukan di Indonesia. Sumber daya tersebut berada di wilayah hukum Pertambangan Indonesia sehingga berhak di kuasai dan di operasikan oleh Pemerintahan Indonesia.
2. Pemerintah sebagai pengendali pertambangan dan menjadi penyelenggara pengeksplorasian minyak seperti dijelaskan pada ayat (1) eksplorasi pertambangan diselenggarakan oleh pihak Pemerintah.
3. Pemerintah membentuk badan pelaksana pertambangan seperti pasal 1 sehingga menjadi pemegang Kuasa Pertambangan berwenang dan dijelaskan dalam pasal 1 angka 23.

²² <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt547e86f116bc3/proyeksi-tata-kelola-industri-hulu-migas-broleh--willy-farianto-nugroho-eko-priamoko> diakses 2 mei 2016

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 menyatakan “*Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi*”²³”.

Dengan adanya pembaharuan undang-undang yang terjadi, maka terjadi pergeseran pemegang eksplorasi pertambangan dari kontraktor ke pemerintah dengan diberikannya SKK minyak dan gas dan kontraktor dari SKK minyak dan gas untuk pengeksplorasian lanjutan. Mahkamah konstitusi berperan dalam penafsiran konsep penguasaan minyak dan gas oleh Negara yang menjadi sebuah putusan Nomor 36/PUU-X/2012 pada tanggal 13 November 2012. Penjelasan tentang putusan tersebut di artikan dengan penguasaan Negara atas pertambangan harus secara bersamaan dan beracuan pada UUD 1945 yang memberikan kekuasaan pada Negara untuk tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), membuat kebijakan (*beleid*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengaturan (*regelendaad*), serta melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang akhirnya dilakukan untuk kemakmuran rakyat dan kepentingan nasional.

Pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya minyak dan gas dengan memberikan konsesi peraturan pada satu atau beberapa badan yang dimiliki oleh Negara untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas dalam sector hulu. Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kerjasama dengan perusahaan daerah, badan usaha yang dimiliki oleh daerah, serta usaha mikro serta badan hukum daerah yang berbadan hukum swasta sebagai usaha pengeksplorasian pertambangan yang tetap dimiliki dan di kelola oleh pihak Negara.

Perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi terjadi dua perubahan yang pertama berisi tentang wakil Negara yang menjadi pengawas dalam system ini, serta serta menjadi pengendali system hulu minyak dan gas atau sebagai pengawas dan pengontrol proses pengeksplorasian minyak dan gas. perubahan kedua berisi tentang pola eksplorasi yang nantinya menjadi pelaksana lapangan agar tidak terjadi eksplorasi yang mengandung eksploitasi minyak dan gas yang menjadi

²³ ibid

instrumen dalam pengeksplorasian minyak di lapangan. Dalam perubahan tersebut mahkamah konstitusi menginginkan tindakan pengaturan ulang agar ada pengawasan intens dan pengendalian pengelolaan minyak dan gas dalam industry hulu minyak dan gas yang dilakukan oleh badan eksekutif Negara yakni pemerintahan. Hal tersebut memberikan pandangan bahwa undang undang minyak dan gas nantinya harus memberikan surat kuasa atau pengukuhan terhadap SKK migas sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang berwenang untuk pengaturan pertambangan pengawasan dan pengelolaan.

Perubahan – perubahan isi tentang syarat dan ketentuan yang ada pada PT Pertamina (Persero) terjadi agar ada peningkatan yang signifikan dalam eksplorai minyak. Eksplorasi minyak pertamina sendiri pertama kali terjadi pada tahun 1997. Perubahan kedua pada tahun 1998 di tandai dengan perubahan harga 15% menjadi 25%. Serta perubahan yang ketiga terjadi pada tahun 1999 dengan adanya performance deferenciacy notice. perubahan keempat terjadi pada tahun 2001-2007. Dan perubahan terakhir terjadi pada tahun 2008 hingga sekarang. Perubahan akhir dari finansial komitmen menjadi work program Komitmen dalam undang – undang eksplorasi minyak dan gas yang ada di Indonesia.

Dalam pembahasan selanjutnya dalam karya tulis ilmiah ini akan membahas tentang Perubahan Pengelolaan Migas Pasca Reformasi dimana Setelah Reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, perubahan signifikan terjadi pada tata kelola minyak dan gas dimana pada tanggal 23 Nopember 2001 telah di buat sebuah UU Nomor 22 Tahun 2001 yang berisi tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang yang membahas tentang minyak dan gas tersebut kemudian menjadi acuan dasar pertimbangan perubahan undang-undang terdahulu yakni UU No. 44 Prp. Tahun 1960 yang tidak sesuai di aplikasikan dengan kegiatan pertambangan minyak dan gas di taraf nasional ataupun Internasional. Undang - undang nomor 22 tahun 2001 yang merubah arus

hilir menjadi lebih terbuka bagi perusahaan asing dari luar negeri dalam pengeksplorasian minyak di Indonesia²⁴.

Perubahan yang terjadi pada undang-undang minyak dan gas 22/2001 ini dapat dilihat dari pembaharuan pengelolaan minyak dan gas. ini adalah pengalihan pengelolaan migas dalam Kuasa Pertambangan dari Perusahaan Negara PERTAMINA kepada pemerintah. Salah satu hal utama sebagai konsekuensi pengesahan UU 22/2001 ini adalah perlu dibentuknya adanya Badan Pelaksana (dibentuk BP MIGAS) dan Badan Pengatur (dibentuk BPH MIGAS) serta perubahan bentuk PERTAMINA menjadi persero. PERTAMINA bukan lagi sebagai perusahaan pengelola dan pemegang kuasa pertambangan. Dalam kegiatan hulu PERTAMINA akan menjadi perusahaan yang diberlakukan seperti perusahaan-perusahaan kontraktor. Dan akhirnya PERTAMINA juga mendandatangani KKKS dengan MIGAS pada tanggal 17 September 2005. Dalam hal produksi nasional, BPMIGAS menjadi badan negara yang mengelola produksi atas bagihasil di lapangan-lapangan yang dikelola oleh kontraktor (KKKS)²⁵.

2.2 Sistematika Tata Kelola Migas di Indonesia.

Tata kelola minyak dan gas yang ada sekarang merupakan bentuk reformasi dari tata kelola migas terdahulu dimana tata kelola migas di Indonesia kini berjalan cukup baik. di Indonesia sendiri tata kelola minyak dan gas nya saat ini cukup baik bila melihat tentang model kerja samanya yaitu PSC (production sharing contract) yang berisi tentang keuntungan Indonesia jika kontrak tersebut dilaksanakan dengan baik. Isi dari pembagian kontrak produksi itu berisi tentang Perusahaan minyak dan gas Internasional berperan hanya sebagai kontraktor yang berhak atas sebagian dari pengelolaan produksi. Karakteristik pembagian kontrak produksi meliputi perusahaan minyak dan gas yang ditunjuk oleh pemerintah

²⁴ <http://www.bphmigas.go.id/t/peraturan-pemerintah> di akses 5 mei 2016

²⁵ <http://pse.ugm.ac.id/wp/wp-content/uploads/Pengaturan-Tata-Kelola-Gas-Bumi-dalam-UU-Migas.pdf> di akses agustus 2016

untuk menangani wilayah produksi tertentu. Kontraktor yang mengelola sebagian produksi menanggung semua hal tentang pengelolaan produksi termasuk menanggung resiko dan biaya eksplorasi dan pengembangan pengelolaan produksi. Pengelolaan produksi yang dilaksanakan oleh kontraktor bila akhirnya berhasil menemukan minyak dan gas maka biaya eksplorasi akan dikembalikan pada kontraktor atau biaya *cost recovery* yang di bayarkan setelah hasil produksi. Kontraktor menerima hasil setelah di kurangi biaya eksplorasi atau sharing laba. dan istilah tersebut banyak disebut dengan istilah profit split. Kontraktor juga diwajibkan membayar pajak dari hasil produksi serta hasil lainnya dalam pengelolaan minyak Indonesia kepada Negara²⁶.

Tata kelola minyak dan gas di Indonesia banyak terdapat intervensi kepentingan sehingga banyak terjadi permainan politik yang memangkas nilai laba perusahaan minyak milik negara. Transparansi yang terjadi terhadap pengelolaan minyak antara kontraktor, pemerintah, dan regulator menjadi sebuah tingkatan yang perlu di perhatikan agar nilai hasil produksi juga meningkat. Karena dalam praktek pendistribusian dan pengelolaan minyak di Indonesia terdapat keterlibatan mafia minyak dan gas. Transparansi tersebut harus dilakukan untuk membuang praktek mafia minyak dan gas serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan perusahaan minyak milik Negara.

Pertamina sebagai perusahaan migas milik negara haruslah di beri kewenangan lebih mengenai pengelolaan industri migas di Indonesia. Di Indonesia keterlibatan pemerintah dalam industri migas baik eksplorasi dan produksi jelas hanya dapat dilakukan oleh PT. Pertamina. Kedudukan PT Pertamina di Indonesia adalah perusahaan minyak nasional yang memiliki kewenangan produksi dan berkontribusi dalam kegiatan minyak dan gas nasional. Tetapi permasalahannya PT Pertamina sejauh ini kurang berkontribusi terhadap produksi minyak dan gas nasional beda dengan perusahaan minyak nasional negara lain. Kurang berkontribusinya perusahaan minyak dan gas PT Pertamina dapat dilihat karena perusahaan minyak dan gas di Indonesia lebih banyak di kelola oleh perusahaan asing.

²⁶ <http://www.juragansolar.com/sejarah-minyak-pertama-di-Indonesia/> di akses juli 2016

Pengelolaan lapangan oleh kontraktor asing akan menguntungkan negara bila dilakukan dengan baik, model kontak kerja sama yaitu PSC²⁷. Tetapi semua itu pasti tidak dilakukan dengan baik sehingga keuntungan tidak di nikmati oleh negara sendiri, semua hal tersebut terjadi karena banyak praktik mafia minyak dan gas di dalamnya yang sangat merugikan bagi negara dalam hal ini Pertamina yang selalu di kambing hitamkan oleh masyarakat Indonesia sebagian besar²⁸. Kenyamanan Pemerintah Indonesia yang terkesan hanya menikmati posisi sebagai penerima hasil dari produksi minyak dan gas yang ada tanpa melakukan suatu eksplorasi dan resiko. Sementara itu, pihak kontraktor yang diwajibkan bagi hasil dan pajak dari kontraktor pihak pemerintah tidak mau ikut melakukan investasi dan resiko yang besar dalam eksplorasi minyak dan gas. Dalam kenyamanan eksplorasi pihak pemerintah inilah terhentinya perkembangan minyak dan gas di Indonesia. Kurang tertariknya pihak pemerintah dalam investasi eksplorasi minyak dan gas membuat perkembangan industri minyak dan gas di Indonesia jalan di tempat. Apabila pemerintah Indonesia berani berinvestasi lebih dalam sector minyak dan gas maka akan menguntungkan Negara Indonesia karena dapat menambah kemakmuran bangsa Indonesia melalui hasil minyak dan gas yang di hasilkan oleh alam Indonesia. Semua tata kelola migas akan berjalan dengan baik jika dilakukan dengan transparan, dan tanpa adanya praktek mafia minyak dan gas. Meski pengelolaan lapangan di kerjakan oleh pihak asing. Tetapi akan lebih baik lagi jika pengeksplorasian lapangan minyak dan gas yang ada di Indonesia di kelola dan dikembangkan oleh sumber daya manusia yang ada di Indonesia dan hasil yang di peroleh dari pengeksplorasian tersebut juga dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Data tentang pengelolaan minyak dan gas di Indonesia. Dan beberapa hasil Penemuan lapangan-lapangan minyak yang didapat oleh penulis diantaranya semakin sulit dan gas di Indonesia ini membuat pengelolaan migas dengan PSC (*Production Sharing Contract*) ini harus selalu dikembangkan lebih dalam lagi.

²⁷ <http://pse.ugm.ac.id/wp/wp-content/uploads/Pengaturan-Tata-Kelola-Gas-Bumi-dalam-UU-Migas.pdf> di akses 15 desember 2015

²⁸ <http://www.migas.esdm.go.id/post/category/regulasi/undangundang> di akses 7 oktober 2016

Sistem bagi hasil yang ada dalam PSC dimana system tersebut mulai pada tahun 1951, namun sistem PSC modern memang dimulai pada tahun 1966 setelah 2 tahun negosiasi antara PERMINA dengan *Independent Indonesia-America Petroleum Company (IIAPCO)* untuk Wilayah Kerja (WK) Offshore North West Java (ONWJ)²⁹.

Disebut sebagai PSC modern karena pokok-pokok kontrak tersebut hingga saat ini masih dipakai³⁰. Sedangkan kalau dilihat perkembangannya PSC dengan digabungkan Undang-undangnya maka:

1. Kontrak pembagian hasil produksi Generasi pertama pada tahun 1960 – 1976.

Minyak dan gas bumi setiap tahun hasil produksinya dibagi menjadi dua bagian³¹, yaitu:

- a. Adanya pengembalian biaya eksplorasi minyak (*Ceiling Cost Recovery*) di anggarakan sejumlah 40% dari hasil produksi. Biaya ini di anggarakan untuk alokasi pengembalian biaya eksplorasi dan eksploitasi perusahaan sumur minyak baru.
- b. 60% sisanya disebut sebagai profit oil atau equity oil yang dibagi:
- c. Pembagian sebagai berikut :
 - 1) 65% untuk PERMINA dan 35% untuk Kontraktor untuk produksi 75 ribu BOPD.
 - 2) 67.5% % Pertamina, 32 % % Kontraktor untuk produksi antara 75.000 sid 200.000 per hari:
 - 3) 70 % Pertamina, 30 % Kontraktor untuk produksi di atas 200.000 barrel per hari.
 - 4) Alokasi Jangka Waktu untuk pengeksplorasian selama 6 Tahun, dapat di perpanjang dan perpanjangan masing-masing 2 tahun.

²⁹ <http://www.migasreview.com/post/1484795907/pertamina-tandatangani-perpanjangan-kontrak-bagi-hasil-blok-onwj.html> di akses 14 januari 2016

³⁰ <http://www.Indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267?> di akses 14 januari 2016

³¹ http://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/nrgi_reformasi-sistem.pdf di akses 14 januari 2016

- 5) Pajak Sebesar 56% dan tidak dibedakan antara pajak corporate dan dividen.
- 6) Komersialitas dibatasi dengan minimum pendapatan negara adalah 49% dari pendapatan kotor dan ditentukan oleh Pertamina dan Kontraktor.
- 7) DMO sebesar 25% dari milik kontraktor dengan pembayaran sebesar US\$0.2/bbl.

2. Kontrak bagi hasil PSC kedua pada tahun 1976 – 1988

Kontrak pembagian hasil atau Production Sharing Contract yang dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia dalam rangka meningkatkan keuntungan nilai eksplorasi minyak di Indonesia. Salah satu cara Pemerintah Indonesia meningkatkan keuntungan dengan cara mengganti atau memperbaharui model kerjasama bagi hasil. Pergantian model bagi hasil yang sebelumnya memberikan dua poin atau level bagi hasil menjadi satu poin bagi hasil dengan prosentasi 85 banding 15 untuk minyak dan 70 banding 30 untuk gas. Pengecualian untuk kerjasama pembagian hasil produksi di mana bagi hasilnya sebesar 88 banding 12 untuk Pertamina. Penerimaan Negara dibagi dalam dua kelompok yaitu:

- a. Penerimaan Negara berupa Pajak Perseroan dan Dividen termaksud dalam peraturan perpajakan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian
- b. Penghasilan Negara terkecuali nilai pajak-pajak yang tertuang dalam butir 1 termasuk kedalam bagian produksi. Sehingga, bagian tersebut bisa diserahkan kepada Negara yang berhak sebagai pemilik kuasa atas sumber daya minyak dan gas. Hasil produksi juga wajib di serahkan oleh kontraktor sebagai bagi hasil dari hasil produksi yang diterimanya untuk kebutuhan dalam negeri Indonesia, bea masuk, iuran pembangunan daerah (PBB), bonus, dan lain-lain juga termasuk di dalamnya.
- c. Jumlah pajak dari pembagian hasil produksi sebesar 56%, dimana pajak tersebut terdiri dari 11% pajak Dividend and 45% pajak Corporate.
- d. Batas pengembalian biaya eksplorasi yang biasanya sebesar 40% dari hasil produksi dihapuskan. Sehingga kontraktor dapat pengembalian biaya

eksplorasi dan eksploitasi biaya maksimum untuk penemuan sumber baru. maksimum 100% dari revenue sebagai penggantian biaya pengembalian yang didasarkan pada Generally Accepted Accounting principle (GAAP).

- e. Pembagian pendapatan Kotor per tahun dengan biaya pengembalian hasil eksplorasi yang kemudian di bagi antara PT Pertamina dan Kontraktor. Masing masing sejumlah 65, 91% untuk pemerintah dan 34, 09% untuk kontraktor dalam pengembalian minyak dan 31,82% Pertamina dan 68,18 % kontraktor dalam pembagian hasil gas.
- f. Kontraktor yang terlibat dalam eksplorasi tersebut akan dikenakan pajak sebesar 56% (45% pajak pendapatan dan 20% pajak dividen), dengan demikian pembagian bersih setelah pajak adalah 85% Pertamina banding 15% kontraktor (pembagian minyak) dan 70% Pertamina banding 30% kontraktor (gas). Apabila Pajak bisa turun dari 56% menjadi 48%, maka untuk mempertahankan nilai pembagian dari hasil yang ada produksi yang dihasilkan di ubah sebesar 71,15% Pertamina dan 28,85 kontraktor dalam eksplorasi minyak dan di ubah menjadi 42,31% banding 42,31% untuk gas.
- g. Dalam eksplorasi lapangan terbaru untuk pencarian sumber minyak yang akan di kaji kontraktor bias mendapatkan kredit 20% dari pengeluaran capital dari hasil produksi dan diberikan jangka waktu sekitar 5 tahun.
- h. Jangka waktu 5 tahun tersebut di berikan pinjaman sebesar 20% dari milik kontraktor dengan pembayaran sebesar US\$0.2/bbl.
- i. Jangka Waktu Eksplorasi selama 6 Tahun, dan tidak dapat diperpanjang (dalam beberapa kontrak dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun).
- j. Komersialitas dibatasi dengan minimum pendapatan negara adalah 49% dari pendapatan kotor dan ditentukan oleh Pertamina dan Kontraktor.

3. Kontrak pembagian hasil produksi ketiga tahun 1988-1993³².

Pada perubahan kontrak pembagian hasil produksi ketiga yang di mulai pada tahun 1988. Kebijakan fiscal baru yang di revisi pada saat itu menjadi salah satu kebijakan yang di perkenalkan sebagai salah satu bentuk PSC baru. Kebijakan tentang kontrak pembagian hasil tersebut di mulai dengan di berlakukannya kebijakan fiskal dan pajak serta FTP, kenaikan nilai biaya DMO dan perbaikan kebijakan untuk proyek-proyek deepwater, marginal, frontier, dan reservoir pre-tercier pada kala itu. Pada tahun 1988 PT Pertamina memperkenalkan syarat dan kebijakan yang berbeda untuk kontrak baru pada area-area tertentu. Kontrak area baru dan perpanjangan juga masuk ke dalamnya yang di bagi menjadi dua kategori yakni frontier komersialitas dan konvensional yang dibatasi dengan jumlah minimum pendapatan Negara Indonesia sebesar 25% dari pendapatan kotor. Pendapatan tersebut di tentukan oleh PT Pertamina dan kontraktor sebagai pihak yang berwenang mengatur nilai pendapatan area tersebut.

4. Kontrak pembagian hasil produksi keempat pada tahun 1994 – 2001.

Kontrak pembagian hasil produksi PSC keempat berpedoman pada PP Nomor 35 Tahun 1994 yang isinya terdiri dari Dana ASR, besaran pajak yang berubah dari 48% menyusut menjadi 44%. Besaran tersebut terdiri dari 30% nilai pajak dan pajak dividen sebesar 14%. Dalam kontrak pembagian hasil produksi PSC Generasi keempat ini terdapat standard investasi kredit untuk keperluan dana cost recovery yang pada awalnya sebesar 17% turun menjadi 15,78 %. Besar nilai bagi hasil sebelum pajak juga berubah yang awalnya senilai 73,22% berubah menjadi 26,78%, sedangkan besaran DMO adalah 25% dari milik kontraktor dengan rincian 15% dari harga ekspor 5 tahun pertama produksi.

Jangka Waktu yang diberikan dalam pengeksplorasian selama 6 tahun dan jangka waktu tersebut dapat di perpanjang sekali selama 4 tahun. Komersialitas yang ada tidak akan diberi batasan minimum pendapatan oleh pemerintah. Kontraktor memiliki kewajiban melakukan pendalaman materi lingkungan sebelum kegiatan eksplorasi minyak baru dilakukan.

³² ibid

2.3 Tata Kelola Produksi dan Konsumsi Minyak Di Indonesia.

Sejak tahun 1990an produksi minyak mentah Indonesia telah mengalami tren penurunan yang berkelanjutan karena kurangnya eksplorasi dan investasi di sektor ini. Penghambatan sector minyak dan gas dalam perkembangan PDB Indonesia membuat pemerintah sadar akan target-target produksi minyak dan gas lanjutan untuk memberikan nilai ekonomi lebih bagi Rakyat Indonesia. Setiap awal tahun Pemerintah Indonesia selalu mereka ulang pendapatan minyak dan dalam beberapa tahun berturut-turut tak tercapainya target produksi minyak selalu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Indonesia . Menuanya lading-ladang minyak yang ada di Indonesia yang saa ini kapasitas penyulingan yang di miliki oleh Indonesia sama dengan satu decade lalu yang memiliki keterbatasan pengembangan dalam produksi minyak. yang menyebabkan kebutuhan minyak Indonesia saat ini tidak terpenuhi dan mengharuskan Pemerintah Indonesia mengimpor minyak dari luar negri demi memenuhi permintaan kebutuhan minyak domestik³³.

Kurangnya hasil produksi minyak domestic yang terjadi di Indonesia terjadi akibat turunnya jumlah hasil produksi minyak domestic yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minyak domestik. Hal itu tidak sesuai dengan permintaan jumlah miyak domestic yang semakin meningkat sehingga membuat Indonesia menjadi salah satu Negara importer minyak mulai tahun 2004 yang lalu sampai saat ini. Dengan adanya impor minyak dari pihak lain atau luar negri berimbas pada penghentian keanggotaan Indonesia sebagai salah satu Negara anggota OPEC dimana Indonesia telah menjadi anggota mulai tahun 1962 hingga 2008 atau sekitar 46 tahun menjadi anggota Negara penghasil minyak dunia atau OPEC. Barulah pada tahun 2015 bulan desember Indonesia kembali bergabung menjadi anggota OPEC³⁴

Tabel 2.1 Produksi Minyak Bumi Indonesia:

³³ ibid

³⁴ http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/3403.htm di akses 5 april 2016

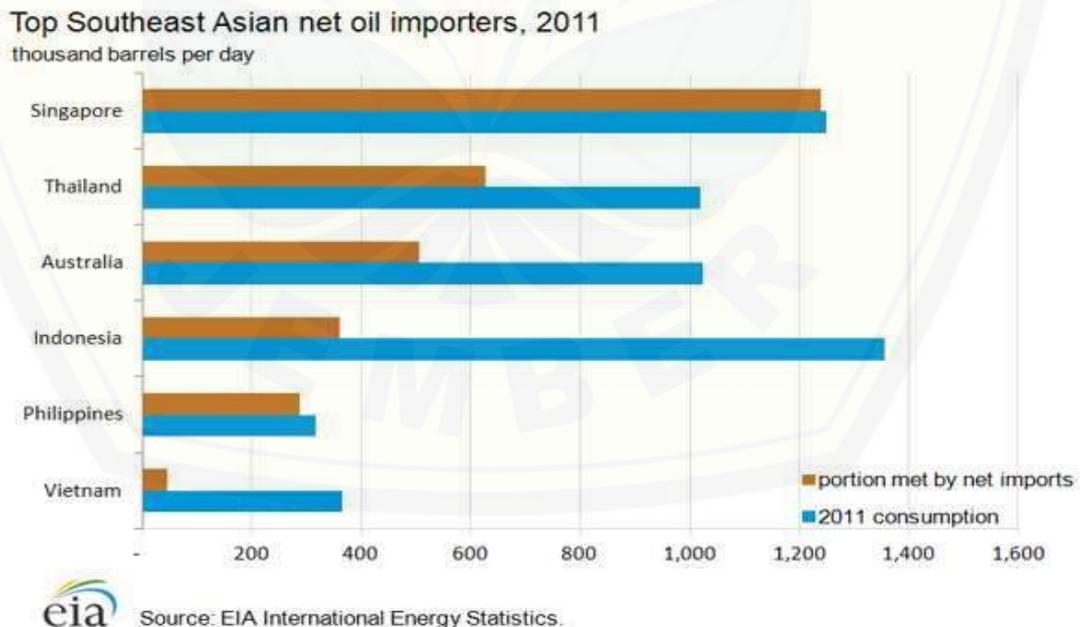
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BP Global	996	972	1,003	990	1,003	942	918	882	852	825
SKKMigas	1,006	954	977	949	945	900	860	826	794	786

¹ dalam ribuan barrels per day (bpd)

Tabel 2.1 Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2016 and SKKMigas³⁵

Pada tabel 2.1 diatas dapat terlihat bahwa Secara kontras, konsumsi minyak Indonesia menunjukkan tren naik yang stabil. Karena jumlah penduduk yang bertumbuh, peningkatan jumlah penduduk kelas menengah, dan pertumbuhan ekonomi; permintaan untuk bahan bakar terus-menerus meningkat. Karena produksi domestik tidak bisa memenuhi permintaan domestik, Indonesia mengimpor sekitar 350.000 sampai 500.000 barel bahan bakar per hari dari beberapa negara.³⁶

Gambar 2.1 Perbandingan Konsumsi dan Impor minyak negara-negara ASEAN³⁷.



³⁵ <http://www.Indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267?> Di akses 5 april 2016

³⁶ ibid

³⁷ ibid

Pada Gambar 2.1 diatas bisa kita lihat bahwa Jumlah konsumsi Bahan Bakar minyak Indonesia terbesar berdasarkan kuantitas, akan tetapi bila dibandingkan dengan Singapore yang memiliki konsumsi bahan bakar minyak tertinggi berdasarkan penggunaan penduduk. Singapore juga menjadi salah satu negara tertinggi pengimpor minyak di ASEAN dilanjutkan dengan Thailand, Australia, Indonesia, Philipine, Vietnam di posisi berikutnya.

Tabel 2.2 Konsumsi Minyak di Indonesia:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bpd¹	1,303	1,244	1,318	1,287	1,297	1,402	1,589	1,631	1,643	1,676	1,628

¹ dalam ribuan

Sumber: BP Statistical Review of World Energy 201638

Dari data yang kami suguhkan ini bisa dilihat jelas jika produksi minyak Indonesia tidak cukup memenuhi kebutuhan konsumsi minyak Indonesia. Banyaknya konsumsi minyak Indonesia tak luput karena kebijakan pemerintah tentang subsidi minyak dalam negeri, subsidi telah banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat Indonesia untuk terus mengkonsumsi bahan bakar.

Pada Juni 2013 dan November 2014 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM. kenaikan BBM bulan November adalah respon presiden Joko Widodo karena tingginya subsidi yang dikeluarkan pemerintah pada periode Susilo Bambang Yudhoyono.

Akibatnya saat Joko Widodo resmi menjabat sebagai presiden terpilih dari Pemilu presiden Jokowi dihadapan situasi sulit terhadap kebijakan kenaikan BBM di era Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah Joko Widodo dilantik menjadi presiden pada 20 oktober 2014, sepuluh hari kemudian Joko Widodo mengumumkan akan mengimpor minyak dari Sonangol EP di Angola. Alasannya Angola merupakan negara kaya minyak kedua di Benua Afrika. Menurut data OPEC, cadangan minyak mentah Angola

³⁸ ibid

mencapai 9,06 miliar barel. Bandingkan dengan cadangan minyak mentah Indonesia yang saat ini berkisar 4 miliar barel.

Produksi minyak Indonesia berbeda dengan produksi minyak Angola secara komersial sudah dimulai sejak tahun 1955. Industri perminyakan terus tumbuh meski terjadi perang sipil antara tahun 1975 hingga 2002. Pada tahun 2013, produksi minyak mentah Angola mencapai 1,7 juta barel per hari. Sementara produksi minyak mentah Indonesia saat ini tercatat hanya sekitar 800 ribu barel per hari perbandingan minyak yang sangat signifikan antara Indonesia dan Angola mengingat sebenarnya Indonesia mampu melakukan Eksplorasi minyak sebanding dengan hasil produksi minyak Angola.

Produksi minyak Angola tumbuh rata-rata 15 persen per tahun. Pada tahun 2007, Angola akhirnya menjadi anggota OPEC. Sementara Indonesia justru resmi keluar dari OPEC pada tahun 2008, setelah produksi minyaknya terus turun bahkan kini menjadi negara pengimpor minyak. Bahkan tak hanya itu, Presiden Jokowi menyebut pembelian minyak dari Angola ini akan memberikan penghematan bagi negara hingga Rp 15 triliun setahun. Sementara Plt Dirut Pertamina M Husen mengungkapkan, pembelian minyak lebih hemat karena langsung ke negara produsen minyaknya. Jadi tidak harus lewat pasar spot. Menurut M. Husen Angola itu negara produsen. Produksi minyaknya mencapai 1,6 juta barel per hari, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan BBM negara Indonesia. Namun meskipun begitu M.husen mengaku tidak mengetahui alasan pasti pembelian minyak kepada Sonangol EP dari Angola ini.³⁹

Sektor minyak dan gas Indonesia merupakan salah satu sektor perekonomian yang secara rutin berkontribusi signifikan untuk memberi pendapatan negara melalui ekspor dunia dan cadangan devisa negara. Kontribusi minyak telah menurun selama satu dekade terakhir, memiliki imbas turun pula kontribusi pendapatan minyak pada APBN. Minyak dan gas berkontribusi sekitar

³⁹http://m.beritajatim.com/ekonomi/223145/tak_tahu_alasan_pemerintah_minta_pertamina_kerjasama_degan_Sonangol_ep.html diakses pada tgl 27 november 2016

13% dari jumlah pendapatan domestik (pada tahun 1990 angka ini mencapai 40% jauh lebih tinggi dari tahun 2014). Turunnya jumlah produksi menghambat perkembangan perekonomian negara Indonesia untuk tumbuh lebih kelevel pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Cadangan minyak yang dimiliki oleh Negara Indonesia masih bisa bertahan hingga 23 tahun lagi. Hal tersebut di jelaskan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral yang mengatakan bahwa Produksi minyak di Indonesia kebanyakan di kelola oleh kontraktor asing dengan dengan pengaturan kontrak hasil produksi PSC. Perusahaan Chevron Pacific Indonesia yang merupakan anak perusahaan Chevron Corporation adalah salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia. Chevron Pacific Indonesia memiliki nilai pengelolaan eksplorasi pengolahan minyak Indonesia sekitar 40% dari total eksplorasi nasional. Perusahaan – perusahaan lain yang bermain dalam pengeksplorasian minyak di Indonesia kebanyakan adalah pemain minyak besar dari China. Perusahaan tersebut antara lain : Petro China, Total, Conoco Phillips, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) [Pertamina](#), CNOOC, Kodeco, Medco, BP, dan Exxon Mobil.

Pada sub bab kali ini selain membahas tentang produksi dan konsumsi juga akan membahas tentang Proyeksi Masa Mendatang Sektor Minyak di Indonesia. Seperti halnya dengan negara-negara lain. Indonesia berusaha mengurangi ketergantungan pada nilai konsumsi minyak. Hal itu disebabkan oleh tingginya harga minyak dan masalah lingkungan hidup. Saat ini, kira-kira 50% energi negara ini bersumber dari minyak; angka yang ingin dikurangi Pemerintah menjadi 23% pada tahun 2025 dengan menempatkan lebih banyak penekanan pada sumber-sumber terbarukan dan batubara.

Tabel 2.3 Proyeksi Pengalihan Minyak ke Sumberdaya Alam lain.

	Energy Mix 2011	Energy Mix 2025
Minyak	50%	23%
Batubara	24%	30%
Gas Alam	20%	20%
Energi Terbarukan	6%	26%

Sumber: Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM)⁴⁰

Harapan Pemerintah Indonesia untuk memulihkan kekuatan sektor minyak sangatlah tinggi. Indonesia sendiri masih memiliki cadangan minyak yang sangat besar yang belum mampu tereksplorasi. Permintaan kebutuhan minyak domestik yang tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Industri minyak pada dasarnya merupakan salah satu industri yang sangat menguntungkan walaupun harga minyak dunia semakin menurun akan tetapi bisnis dalam produksi minyak masih sangat menjanjikan hal itu di buktikan oleh angka-angka keuntungan perusahaan minyak milik negara yakni PT Pertamina (Persero) dalam Rapat umum pemegang saham dan pembagian angka-angka laba bersih Pertamina. Kendati begitu, akan dibutuhkan usaha serius dari semua kalangan terutama pemerintahan Republik Indonesia. Untuk Produksi Indonesia bisa mencapai kembali kuantitas produksi 1 juta barel/hari yang tidak bisa direncanakan tanpa kerjasama semua kalangan karena dibutuhkan investasi-investasi skala besar untuk mencapai target ini dan dibutuhkannya dukungan berbagai kerangka peraturan baru yang lebih transparan dan pasti. Dalam target produksi minyak

⁴⁰ Ibid.

Indonesia terdapat kendala lurangnya investasi dalam pengadaan eksplorasi minyak yang berdampak pada penurunan level produksi minyak Indonesia selama dua dekade terakhir. Hal ini juga tidak terlepas dari penuaan ladang-ladang minyak Negara yang butuh ladang baru untuk di eksplorasi. Serta tidak adanya jalan investasi dalam pengembangan sektor minyak hilir. Sehingga penurunan jumlah produksi minyak akan lebih sedikit.



BAB III

SEJARAH PERKEMBANGAN MINYAK ANGOLA

Seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa kebutuhan Indonesia terhadap gas dan minyak tumbuh dengan signifikan. Karena keterbatasan produksi dalam negeri, maka sebagai kebutuhan Indonesia untuk mengimpor minyak dari luar negeri juga semakin tinggi. Atas dasar inilah maka Indonesia membuat kebijakan mengimpor minyak dari luar negeri, salah satunya dari Sonangol EP Angola.

Pada bab ini akan dibahas tentang kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP Angola. Di awal pembahasan bab ini akan diterangkan sekilas tentang kondisi Negara Angola, terutama pembahasan tentang perdagangan dan energi. pembahasan selanjutnya akan dibahas tentang perusahaan minyak Angola yakni Sonagol EP. Bab ini akan ditutup dengan diskusi tentang sejarah kerjasama Indonesia- Angola, mulai dari bagaimana latar belakang terbentuknya hubungan diplomasi antara Angola - Indonesia. hingga, kerjasama Ekonomi politik Internasional. Dalam tulisan ini membahas tentang kebijakan ekonomi politik internasional yang akan difokuskan pada Kebijakan Indonesia Membeli minyak dari Sonangol EP Angola.

3.1 Sejarah Angola.

Negara Angola merupakan salah satu negara di Benua Afrika yang terletak di pantai barat daya Afrika yang berbatasan dengan Samudra Atlantik. Negara Angola yang berbatasan dengan Republik DemokratikKongo dan Zambia ini termasuk negara yang berada di Afrika Selatan. Luas wilayah Angola lebih luas dibandingkan dengan luas gabungan dari Negara Perancis, Jerman, dan Inggris. Yakni mencapai 1. 246.700 km², jumlah penduduk Angola hanya 81,9

juta, atau 15,2 orang per square meter⁴¹. Angola sendiri merupakan negara yang di jajah selama berabad-abad oleh koloni Portugis dan pada akhirnya Angola merdeka pada tahun 1975.

Republik Angola yang merdeka pada tanggal 11 November 1975. Negara ini termasuk salah satu negara di Afrika yang memiliki sejarah panjang ditindas oleh bangsa lain dalam sejarah penjajahannya. Sebelum merdeka, rakyat Angola telah melakukan perang selama 14 tahun melawan pemerintahan fasis Portugal. Setelah Angola merdeka, Negara Angola tak henti-hentinya mengalami perang saudara yang semakin diperburuk lagi keadaannya dengan adanya campur tangan asing seperti Afrika Selatan, Rusia dan Amerika di dalam pemerintahan Angola pasca merdeka.

Krisis keamanan dan perebutan kekuasaan yang terjadi di Angola seperti tak pernah berhenti mendominasi perjalanan sejarah Negara Angola. Akibatnya, terjadi krisis ekonomi dan ketidak stabilan negara karena perang panjang yang terjadi di Negara Angola dan berlangsung hampir seperempat abad atau 25 tahun. Sumber daya Alam di Negara Angola sangat melimpah. Salah satu sumber daya alam tersebut seperti minyak, melimpahnya produksi minyak yang ada di Angola tidak sejalan dengan pendapatan per kapita negara Angola. Angola memiliki pendapatan perkapita yang amat rendah, bahkan menjadi salah satu Negara dengan pendapatan per kapita terendah di dunia berdasarkan data pendapatan Negara Angola pada tahun 2014 yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Angola Dalam APBN 2015 adalah 13.480 miliar Kwanzas. Nilai tersebut setara dengan USD 128.564 atau sekitar Rp. 1.115.474 miliar. Jumlah pendapatan Negara Angola tersebut didorong oleh ekonomi non-minyak dimana pertumbuhan tahunan ekonomi non-minyak mencapai 9,2%. Nilai PDB Angola tersebut harus dibagi dengan 24,3 juta orang jumlah penduduk di Angola. Jumlah penduduk tersebut, dipatok dari hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Angola pada bulan Mei 2015. Sehingga

⁴¹<http://Indonesian.cri.cn/1/2007/02/12/1@58907.htm> di akses 14 januari 2016

pendapatan perkapita perpenduduk sejumlah 548.598 kwanzas atau sekitar 5273 USD atau jika di rupiahkan menjadi Rp. 68.549.000 pertahun.⁴²

Penduduk Angola yang berjumlah 24.383.301 sekitar 85 % rakyat Angola memiliki pekerjaan di bidang Pertanian. Pendapatan Angola sebagian besar dari penghasilan minyak dengan prosentase pendapatan minyak mencapai 50% dari PDB Negara Angola., Destabilisasi Ekonomi selama beberapa dekade sering terjadi di Angola. Hal itu disebabkan sering terjadinya perang saudara yang terjadi didalam Negara Angola. Ketidakstabilan ekonomi di Angola menghasilkan sering sekali menghasilkan sebuah Reformasi ekonomi. Reformasi ekonomi terakhir yang terjadi di Angola terjadi pada tahun 2012. Pada Reformasi ekonomi tersebut Pemerintah Angola menyebutnya sebagai stabilitas ekonomi kwanza. Dimana, stabilitas tersebut mengurangi tingkat inflasi yang terjadi pada krisis ekonomi yang terjadi di Angola tahun 2012.

Penambahan rangkaian reformasi Ekonomi di Angola ditandai dengan di bangunnya infrastruktur di Negara Angola yang nantinya diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur yang menjadi salah satu factor pendukung bangkitnya stabilitas ekonomi di Angola. Semakin majunya Negara Angola sebenarnya memiliki berbagai macam masalah stabilitas, krisis dan perang saudara yang terjadi di dalam negeri. Berbagai macam masalah yang terjadi di Angola tersebut adalah sebuah tantangan tersendiri bagi situasi pemerintahan di Angola. Dimana pentingnya menjaga stabilitas di berbagai situasi serta stabilitas ekonomi nanti akhirnya di harapkan mampu untuk memperbaiki system birokrasi, tingginya tingkat kemiskinan dan kesulitasn social yang banyak di jumpai di Negara produksi minyak tersebut.

Angola merupakan salah satu negara anggota *Organization of the Petroleum Exporting Countries* atau yang di kenal dengan OPEC . Negara Angola sendiri pada tahun 2013 telah memproduksi minyak sejumlah 1,8 juta barel per

⁴²<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=74&pr.y=0&sy=2012&ey=2014&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=614&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=> di akses 5 agustus 2016

hari. Angola sejak tahun 2002 sebenarnya sudah menghasilkan produksi minyak, produksi minyak Angola mencapai 15% rata-rata pertahun. Pendapatan tersebut di hasilkan oleh adanya sumur minyak kedalaman yang tersebar di beberapa wilayah di Angola. Atau disebut dengan *deepwater*⁴³.

3.2 Perusahaan Minyak Negara Angola Sonangol EP.

Sociedade Nacionalde Combustiveisde Angola European Portuguese atau yang dikenal dengan Sonangol EP merupakan perusahaan minyak yang berasal dari Negara Angola. Perusahaan Sonangol EP adalah satu-satunya perusahaan BUMN yang memegang izin eksplorasi minyak dan gas di Negara Angola dan bertanggung jawab atas kegiatan eksplorasi, produksi, manufaktur, transportasi dan pemasaran hidrokarbon di Angola. Sonangol didirikan pada tahun 1976 dari nasionalisasi sejumlah perusahaan minyak di Angola. Dengan keputusan nomor 52/76 Pemerintah Sonangol melembagakan Sonangol EP sebagai perusahaan milik negara yang mempunyai misi untuk mengelola sumberdaya eksplorasi hidrokarbon di Republik Angola.

Krisis keamanan dan perebutan kekuasaan negara terus mendominasi perjalanan sejarah bangsa ini, akibatnya terjadi krisis ekonomi. Angola memiliki sumberdaya alam yang kaya namun pendapatan per kapita negara ini termasuk yang terendah di dunia. Produksi minyak merupakan sumber pendapatan perekonomian yang utama di negara ini dengan kontribusi 50% dari *Gross Domestic Product (GDP)* dan 90 % dari angka ekspor negara. Sonangol Group sebagai perusahaan milik pemerintah mengontrol secara penuh industri minyak di Angola. Perekonomian negara yang tumbuh diperkirakan 4% pertahun dihitung mulai dari tahun 1999 hampir dimotori oleh industri perminyakan ini.

Sejarah perkembangan Sonangol EP Angola dari tahun ke tahun⁴⁴

- 1) Pembentukan Sonangol U.E.E pada tahun 1976

⁴³[www.PT Pertamina \(Persero\).com](http://www.PT Pertamina (Persero).com)”Pertamina Sonangoljalin kerjasama pengembangan bisnis hulu hili rmigas” di akses 14 januari 2016

⁴⁴www.Sonangol.co.uk di akses 14 januari 2016

- 2) Lembaga anak perusahaan internasional pertama, Sonangol Terbatas di London, Inggris pada tahun 1983.
- 3) Mengikuti konsesi minyak pertama di perairan dalam di Blok 16 pada tahun 1991.
- 4) Pembentukan anak perusahaan Sonangol untuk sebuah perusahaan minyak pada tahun 1992
- 5) Sonangol U.E.E. berganti menjadi Sonangol S.E pada tahun 1999.
- 6) Sonangol memulai operasi perusahaan minyak dengan konsesi lepas pantai Blok 03 pada tahun 2003
- 7) Distributor dimulai internasionalisasi dengan membuka SPBU di Portugal pada tahun 2005
- 8) Peresmian pertama 2008.
- 9) Perizinan unit pengolahan Kilang di Lobito pada tahun 2009
- 10) Tanda tangan kontrak bagi hasil dari Pra Salt Blok di Angola pada tahun 2011
- 11) Francisco de Lemos José Maria berhasil Manuel Vicente Sonangol Presiden menemukan minyak pertama di lapisan pra-garam Angola. cadangan pra-garam diperkirakan mencapai 30 miliar barel 2012
- 12) Angola membuat pengiriman LNG pertama pada tahun 2013.

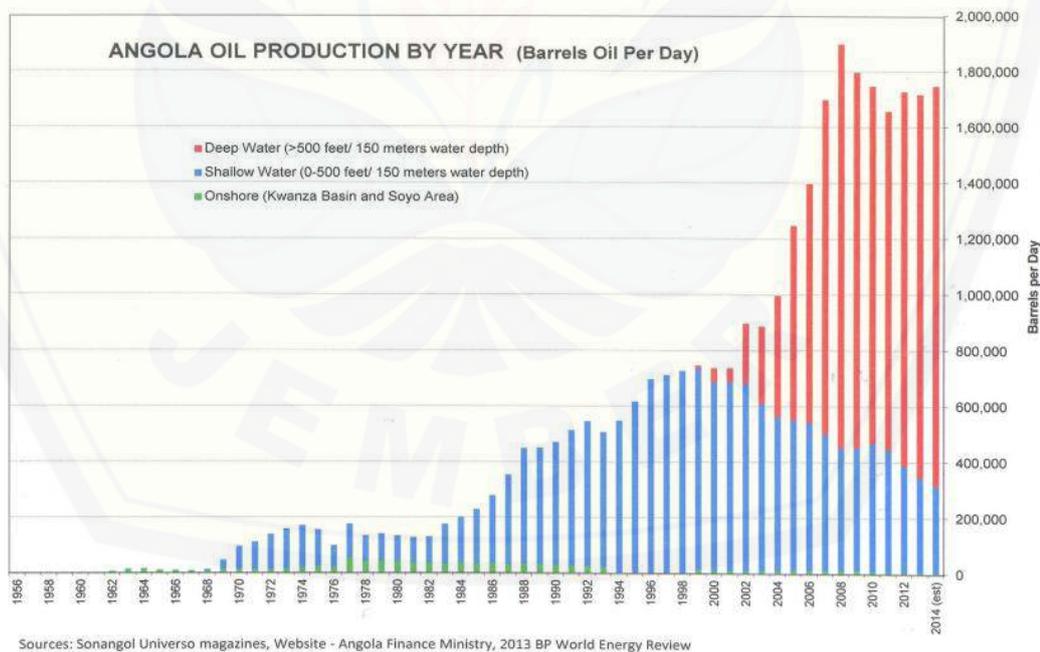
Sejarah tentang Sonangol EP Angola tersebut merupakan barisan panang perjalanan perusahaan BUMN Minyak dan gas negara Angola. Menariknya walaupun diakui bahwa Sonangol EP adalah perusahaan milik negara Angola pada kenyatannya berdasarkan data Energy Intelligence Research, yang dilansir pada 2011, Chevron dan Exxon turut terlibat dalam pengelolaan migas di negeri Angola yang bekerjasama dengan Sonangol EP.⁴⁵ Menurut Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria, berdasarkan data Energy Intelligence Research, sebuah badan internasional yang menghimpun data terkait perusahaan migas di seluruh

⁴⁵OffshoreIndonesia.com. "puskepi curiga minya murah Angola" 25 oktober 2015

dunia, saham perusahaan asing tersebut itu dalam pengelolaan Migas di Angola prosentasenya bahkan lebih besar dari pihak Sonangol EP⁴⁶

Angola sendiri merupakan salah satu Negara benua Afrika yang memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Sama dengan Negara afrika lainnya, Angola kaya akan sumber daya alam namun konsumsi minyak didalam negeri sendiri masih sangat kecil, faktor yang mempengaruhi minimnya konsumsi minyak yang ada di Angola sendiri adalah kekurangan ekonomi dan konflik menjadi batasan dalam eksplorasi. Penemuan minyak komersial pertama di Angola dibuat pada tahun 1955 di daratan Kwanza (onshore).⁴⁷ Meskipun sudah ditemukan namun sampai pada tahun 1960 tidak ada produksi. Sedangkan kilang minyak lepas pantai ditemukan oleh Cevron di daerah Cabinda pada tahun 1967.⁴⁸

Gambar 3. 1 Produksi minyak Angola per tahun



⁴⁶ Rimba laut, www.bisnis.news.viva.co.id "pengamat pembelian minyak dari Angola harus dikaji lagi" Di akses desember 2016..

⁴⁷ Secretariat of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Angola facts and figures, diambil dari laporan EIA 2015.

⁴⁸ Tako Koning. 2014. *Angola's Oil Industry - A Century of Progress in Exploration and Production*. Bellaire :Cline & Associates. Hal 42

Sumber : Industri Minyak Angola - Sebuah Era Kemajuan dalam Eksplorasi dan Produksi ⁴⁹.

Sonangol EP Angola memproduksi minyak mentah terdiri dari *light sweet* dimana jenis ini mengandung volume rendah sulfur yang menjadi komposisi pas untuk memproduksi turunan seperti minyak tanah, bensin dan solar kualitas terbaik.⁵⁰ Kelebihan yang dimiliki minyak Angola menjadikan minyak Angola dijual ke berbagai negara salah satunya Indonesia.

Sejak tahun 1980, produksi minyak yang dihasilkan oleh Sonangol EP semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut berlipat dan meningkat stabil menjadi 5 kali lipat pada tahun 1990. Hasil tersebut jauh meningkat dibandingkan awal produksi yakni pada awal tahun 1980. Produksi pada tahun 1980 hanya menghasilkan sekitar 100 ribu barrel per hari. Peningkatan pada tahun 1990 menjadi sekitar 500ribu barrel per hari (lihat gambar 3.1). Eksplorasi minyak yang dilakukan oleh Sonangol EP hingga tahun 1996 masih berada di kawasan air dangkal atau yang disebut *Shallow water*. Hasil Eksplorasi minyak tertinggi yang pernah dilakukan oleh Sonangol EP terjadi pada tahun 1998 yakni sekitar 700ribu barrel perhari. Meski produksi minyak di Angola telah lama dilakukan. Akan tetapi, Sonangol belum pernah melakukan peningkatan area eksplorasi kawasan minyaknya. Hal itu disebabkan oleh Masih banyaknya perdebatan tentang kawasan eksplorasi minyak yang ada di Angola.⁵¹ Perdebatan tentang rencana produksi yang ada di Angola dikarenakan adanya peningkatan eksplorasi minyak yang permasalahannya semakin banyak dan kompleks. Hal ini menjadi rahasia umum yang terjadi pada produsen minyak di Angola karena Angola termasuk salah satu Negara miskin dan beberapa produsennya juga miskin dan kekurangan modal. Resiko yang semakin tinggi dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi di Angola. Hal itu disebabkan oleh banyaknya resiko eksplorasi di bidang perminyakan, minimnya sumber daya manusia yang memadai di Angola serta tingginya biaya

⁴⁹ibid

⁵⁰Maria Iya Ramos. 2011. *Angola Oil Industry Operations*. Angola : Osisa . hal. 32

⁵¹ Ibid, hal 25

Eksplorasi. Resiko tersebut berlaku bagi eksplorasi di daerah dalam yang masih minim tingkat eksplorasinya, dan sebenarnya eksplorasi tersebut masih bisa di eksplorasi lebih besar lagi hasil produksi minyak di Angola.

Perusahaan minyak Sonangol EP mendapatkan izin lisensi pengeksplorasian minyak di kedalaman (*deep water*) pada tahun 1994. Eksplorasi tersebut memunculkan sekitar 50 tempat penemuan sumur minyak terpenting di Angola.⁵² pada tahun 1999 Sonangol EP Angola melakukan pelaksanaan eksplorasi *offshore deepwater* dan pertama kali dioperasikan oleh pihak swasta yakni oleh perusahaan Chevron asal china. Eksplorasi tersebut dilakukan di kawasan Kuito Block 14.⁵³ Eksplorasi minyak *offshore deepwater* tersebut berhasil dilakukan oleh Sonangol EP Angola berjalan sangat baik dan tiap tahun produksi di kawasan *deepwater* jauh meningkat dibandingkan dengan kawasan *shallow water* dan pada tahun 2012 menjadi tempat produksi utama yang menyumbang separuh lebih hasil produksi hingga 1,4 juta barrel per hari. Setelah eksplorasi yang dilakukan pada tahun 2012 tingkat produksi di kawasan *shallow water* semakin menurun. Hal tersebut di sebabkan oleh lebih fokusnya eksplorasi di kawasan *deep water* dimana dikawasan terdalam tersebut hasil produksinya lebih besar. Sejak semakin banyaknya eksplorasi di daerah kedalaman sumur *deepwater* memunculkan berbagai kerjasama pengeboran minyak dan mayoritas kerjasama tersebut terjadi dengan pihak luar negeri. Berikut adalah daftar perusahaan-perusahaan patner Sonangol EP Angola yang menjadi perusahaan eksplorasi minyak di Angola :

Tabel 3. 1 Perusahan energy patner Angola

Operator	Patner	Lokasi	Proyek

⁵²EIA.2015. Angola : Country Analysis Brief.

⁵³ <https://www.chevron.com/stories/chevron-starts-production-from-Angolas-first-deepwater-oil-field>. di akses 14 januari 2016

Exxon Mobil	BP	Blok 15 (deepwater)	Kizomba A (Hungo, Cholcalho, Marimba)	
	Eni		Kizomba B (Kizomba, Dikanza)	
	Statoil		Kizomba C (Mondo, SaxiBatuque)	
			Kizomba satellites project (Clochas, Mavacola)	
Chevron	Sonangol	Blok 0 Area A (offshore)	Greater Plutonio (Plutonio, Galio, Cromio, Paladop, Cobalto)	
	Total		Blok 0-Area B Offshore	Bomboco, Kokongo, Lomba, N'Dola, Sanha
	Eni		Blok 0-Area B Offshore	Nemba, Tombua, Landana
	Eni, Sonangol, Total, GalpEnergia, Inpex	Block 14 deepwater	Kuito, BBLT (Benguela-Belize Lobito-Tomboco)	

BP	Sonangol Sinopec International (SSI)	Block 18 deepwater	Greater Plutonio (Plutonio, Galio, Cromio, Paladop, Cobalto)
	Statoil, Sonangol, Marathon, SSI	Block 31 Ultra Deepwater	PSVM (Plutao, Saturno, Venus, Marte)
Total	Statoil, Exxon, BP	Block 17 Deepwater	Dalia, Pazflor, Girasol, CLOV

Pluspetrol	Sonangol, Force Petroleum Cubapetro	123-5 Cabinda Onshore	Cabinda C (South)
Sonangol	Total, Eni, Inpex, Mitsui, Naftagas, Naftaplin, Mitsubishi,S omoi, Svenska, NBID	Blok 3 offshore	Palanca, Cobo, Pambi, Oombo, NunceSul
	Statoil, Somoil, Angola Consulting Resources	Block 4/05 deepwater	Gimboa

Tabel3. 1 sumber Laporan EIA⁵⁴.

Proyek eksplorasi minyak yang dilakukan oleh Sonangol EP Angola membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan swasta yang menguasai pengeksplorasian di Angola. Sonangol EP sebagai perusahaan BUMN Multinasional Angola mempunyai area pemasaran minyak yang cakupannya cukup luas. Pemasaran minyak tersebut nantinya mampu

⁵⁴ ibid

membiayai dan memfasilitasi berbagai macam proyek eksplorasi minyak baik dalam segi pembiayaan maupun sumberdaya manusia yang memadai. Eksplorasi yang dilakukan oleh Sonangol EP Angola akan mendapatkan keuntungan yang maksimal jika segala segi pendanaan, SDM dan berbagai faktor lain dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil produksi yang melimpah. Kerjasama dengan perusahaan-perusahaan internasional juga dilakukan seperti Chevron, Total, BP, Exxon mobil, Statoil, dan perusahaan internasional lain. seperti kerjasama dengan Sinopec (China) and CNOOC (China) yang merupakan pemain minyak yang paling dominan di Angola.⁵⁵ Dalam pengelolaan eksplorasi yang ada di Angola. Sonangol EP sebagai perusahaan pengeksplorasian resmi di Angola memiliki syarat-syarat dalam kebijakan industry minyaknya yang di sebut dengan Angolanisasi. Angolanisasi merupakan keterlibatan lebih pihak Angola dalam hal manajemen kontraktor lokal.⁵⁶

Sistem Angolanisasi juga ada dalam segi transaksi yang dilakukan oleh pihak Angola dimana setiap transaksi dari perusahaan minyak internasional wajib menggunakan bank lokal. Keterlibatan bank lokal Angola menjadi bank transaksi minyak di Angola diharapkan mampu memberikan kontribusi \$ 200.000 pertahun/blok. Transaksi tersebut terjadi selama fase eksplorasi dan mendapat \$ 0,15 per barel. Dengan adanya transaksi ini diharapkan mampu mendanai program-program di Angola baik pelatihan atau program lainnya. Peraturan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas keuangan dari anak perusahaan Sonangol dan Angola.⁵⁷

3.3 Hubungan Kerjasama Angola dan Indonesia.

Pada poin ketiga ini akan membahas tentang bagaimana sejarah singkat hubungan bilateral antara Indonesia dan Angola. Pembahasan bilateral dimulai dari awal terbentuknya diplomasi Indonesia dan Angola hingga terjadinya

⁵⁵ Op.cit, hal 4

⁵⁶ Op.cit, hal 4

⁵⁷Emanuel Gomes dan Markus Weimer.2011*Education in Angola:Partnership Opportunities for the UK*. London:chatam house.

kebijakan Indonesia dan Angola. Awal mula hubungan diplomatik Indonesia dan Angola secara resmi dimulai pada tanggal 7 Agustus 2001 melalui MoU dengan PBB yang terjadi di New York.

Hubungan diplomatic antara Indonesia dan Angola meski telah terjadi sejak tahun 2001. Akan tetapi, hubungan kerjasama baik ekonomi maupun politik antara kedua negara belum dapat berkembang sebagaimana mestinya. Hal itu disebabkan oleh belum adanya Perwakilan RI yang secara resmi ditunjuk melaksanakan hubungan kerjasama berdasarkan Lampiran SK Menlu RI No. 06/2004 Dubes LBBP-RI di Windhoek, Namibia. Akan tetapi, baru pada bulan Januari 2006 Dubes RI untuk Namibia yang berkedudukan di Windhoek diinstruksikan secara resmi melakukan perangkapan sebagai Dubes RI untuk Angola⁵⁸.

. Kerjasama dan Hubungan diplomasi pertama yang dilakukan oleh Indonesia dan Angola berkaitan dengan dukungan Indonesia dalam PBB menjadi hubungan awal Indonesia dan Angola. Dukungan Angola dalam politik pertama dilakukan oleh pemerintah Angola. Dukungan politis ini diawali dengan dukungan Pemerintah Angola untuk Indonesia terhadap dukungan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008 dan dukungan terhadap Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2007-2008 dimana pemungutan suara dilakukan pada tahun 2006 dan periode 2007-2010 pemungutan suara tanggal 17 Juli 2007), serta dukungan Angola pada Indonesia sebagai anggota Executive Board WHO periode 2007-2010. Selain itu kerjasama bilateral Indonesia dan Angola ditandai dengan adanya berbagai permintaan dukungan antara lain :

a. Pencalonan Dr. Anwar Nasution sebagai External Auditor WHO periode 2008-2009 dan 2010-2011.

⁵⁸ Kemlu.go.id “Angola” 12 Desember 2016.

b. Pencalonan Ketua DPR RI, Bapak Agung Laksono sebagai President Inter Parliamentary Union (IPU) periode 2009-2011

kerjasama lain antara Indonesia yang pernah ada diantaranya :

1. Pada tanggal 23-25 november 2008 Indonesia mendapar kunjungan Direktur Afrika Bp. Sudirman Haseng dalam rangka menjajaki terbentuknya kerjasama bilateral antara Indonesia-Angola.
2. Tim Sumber Daya Genetik Kelapa Sawit mengadakan kunjungan kepada Direktur Perbenihan dan Sarana Produksi Departemen Pertanian RI dan Peneliti dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit dalam rangka meninjau perkebunan kelapa sawit di Angola, 23 – 28 Oktober 2008.
3. Angola ke Indonesia :
 - a) Kunjungan Delegasi Angola yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Angola, Joao Bernardo de Miranda, ke Indonesia untuk menghadiri KTT-AA 2005 dan Golden Jubilee KAA-1955 dalam bulan April 2005.
 - b) Kunjungan berikutnya terjadi pada bulan Maret 2006, Deputy Menlu Angola untuk Kerjasama Internasional, Dr. Irene Alexandra Da Silva Neto, telah melakukan suatu kunjungan kehormatan kepada Menlu RI, Dr. Hassan Wirajuda, kunjungan kehormatan Angola ini merupakan kunjungan resmi pertama pejabat tinggi Angola ke Indonesia sejak dibukanya hubungan diplomatik tahun 2001. Dimana dalam kunjungan tersebut, Dr. Irene Neto telah menyampaikan beberapa draft usulan perjanjian kerjasama bilateral antara Republik Indonesia dan Angola dalam bidang ekonomi dan teknik.
 - c) Kemudian kunjungan selanjutnya terjadi Pada bulan Mei 2007, Delegasi Parlemen dari Angola berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri Sidang IPU (InterParliamentary Union) ke 116 di Nusa Dua, Bali
 - d) Setelah itu pada tanggal 14-15 Juli 2008, Duta Besar Angola untuk Singapura, H.E. Mr. Flavio Fonseca datang keIndonesia mewakili Pemerintah Angola untuk menghadiri acara NAASP Ministerial Conference on Capacity Building for Palestine yang diadakan di Jakarta.

- e) Beberapa delegasi Angola yang diketuai oleh Dubes Angola untuk Singapura H.E. Mr. Flavio Fonseca mewakili Pemerintah Angola menghadiri acara the World Ocean Conference 2009 (WOC 2009) tanggal 11-15 Mei 2009 di Manado.
- f) Tanggal 12-13 October 2009, Duta Besar Angola untuk Singapura, H.E. Mr. Flavio Fonseca kembali datang keIndonesia mewakili Pemerintah Angola dalam acara NAASP Senior Official (SOM) yang diadakan di Jakarta.

Kerjasama antara Indonesia dan Angola dalam kurun dari 2001 hingga 2014 dalam bidang Ekonomi, Perdagangan dan Investasi belum pernah terjadi.⁵⁹ Kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP Angola pada tanggal 31 oktober 2014 merupakan kerjasama ekonomi pertama antara pemerintahan Indonesia dan Angola. Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tentang pembelian minyak dari Sonangol EP Angola tersebut di sinyalir merupakan ide dari Surya paloh salah satu politisi dan pemilik PT Surya Energi yang merupakan perusahaan yang didukung oleh Sonangol Internasional Holding Limited China.

Kemenangan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia pada tahun 2014 memiliki keterkaitan partai politik nasional demokrat yang dimiliki oleh Surya Paloh yang disinyalir membawa suatu politik balas budi. Pada awal pemerintahan presiden Joko Widodo Surya Paloh menjadi dalang pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP – Angola. Sementara itu keterkaitan Angola dengan Surya Paloh sendiri berawal dari Grup Sonangol Internasional Holding Limited China termasuk dalam kongsi lama Surya Paloh. Pada tahun 2009 PT Surya Energi mendapatkan suntikan dana segar dari Sonangol Internasional Holding Limited China. Anak usaha dari Sonangol Internasional Holding Limited salah satunya adalah Sonangol EP Angola. yaitu Sonangol International Holding Limited. Memberikan suntikan dana pada PT Surya Energisebesar US\$ 200 juta untuk pengembangan Blok Cepu. Kepemilikan saham pada Blok Cepu 75 % dimiliki oleh PT Surya Energi melalui kepemilikan tersebut melalui PT Asri Darma

⁵⁹ <http://www.kemlu.go.id/windhoek/id/Pages/Angola2.aspx>

Sejahtera. Kepemilikan saham lain sebesar 25 % saham perusahaan Blok Cepu dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sedangkan, PT Asri Darma juga menguasai 4,5 % saham blok minyak jumbo dalam Eksplorasi yang ada di Cepu.⁶⁰

Keputusan Pemerintah Indonesia mengimpor minyak dari Sonangol EP Angola menciptakan pro dan kontra dikalangan politisi dan pengamat minyak di Indonesia. Indonesia yang merupakan Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama islam bahkan di katakan negara Indonesia adalah negara islam terbesar. Sangat bertolak belakang dengan Angola yang masih belum melegalkan Islam sebagai agama di Angola. Ketidak Sebenarnya keanehan kebijakan ini dinilai aneh oleh sebagian orang, kejanggalan yang terjadi tentang persetujuan pemerintahan Joko Widodo ini dianggap ganjil. Hal itu disebabkan karena waktu pengambilan keputusan sangatlah singkat antara diambilnya kebijakan ini dan pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo dinyatakan resmi menjabat sebagai presiden Republik Indonesia mulai tanggal 20 oktober 2014. Berselang beberapa hari dari itu Kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP diambil dan penandatanganan kerjasama tersebut terjadi pada tanggal 31 oktober 2014. Terlalu singkatnya jarak pengambilan kebijakan tersebut akhirnya menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak kontra karena menganggap terlalu cepat pengambilan keputusan tanpa melakukan penelitian lebih jauh.

Pada sub bab kali akan membahas tentang bagaimana perusahaan minyak EP bisa menjadi perusahaan minyak yang bekerjasama dengan negara Indonesia. Awal terbentuknya kebijakan pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola. Pembelian Minyak Indonesia dari Sonangol EP Angol merupakan Kebijakanana impor minyak Indonesia yang terjadi di kisaran Tahun 2014-2015 yang disahkan Pada Jumat, 31 Oktober 2014 Presiden Joko Widodo di mana perjanjian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama

⁶⁰Tempo.co.id. "Proyek Sonangol, Palih : Sudah kenyang "makan siang" senin, 24 november 2014

pembelian minyak antara Indonesia dan Angola yang masing-masing di wakili oleh Sonangol EP dan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Fincente sebagai perwakilan dari Angola yang dilaksanakan di Istana Merdeka- Jakarta⁶¹

Penandatanganan kontrak pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola pihak Indonesia diwakili PT Pertamina (persero). Adapun alasan pembelian minyak dari Sonangol EP menurut Presiden Joko Widodo adalah sebagai upaya penghematan dan efisiensi anggaran dalam impor BBM karena pembelian ini dilakukan dengan sistem Government to Government atau antara pemerintah ke pemerintah tanpa adanya perantara.

Sudirman Said selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa penghematan yang bisa didapat sekitar Rp 11 triliun per tahun dengan asumsi kurs Rp 12.082 per dolar Amerika Serikat hal ini berdasarkan perhitungan perencanaan dari Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), Perjanjian ini. Rencananya akan membuat Indonesia membeli 100 ribu barel sehari sehingga bisa menghemat anggaran Negara sekitar US\$ 2,5 juta dolar.⁶² Keputusan mengimpor minyak dari Angola sangat mengejutkan berbagai kalangan. Banyaknya pihak yang selama ini terlibat dalam pengimporan minyak yang di ketahui berasal dari Singapore merupakan salah satu pihak yang sangat terkejut dengan adanya kebijakan ini. Indonesia selama ini diketahui memasok minyak dari PT Pertamina Energy Limited atau yang dikenal dengan PETRAL. PETRAL yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang berkedudukan di Singapore. Kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan perusahaan minyak Sonangol EP Angola ini semakin terjalin erat dengan dikukuhkan dengan Framework Agreement yang dilakukan oleh perwakilan PT (Persero) yaitu Plt. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Muhamad Husen

⁶¹Tempo.com "Hemat Anggaran, Jokowi Beli Minyak dari Angola", Sabtu, diakses 01 November 2015 06:05 WIB

⁶²Liputan6.com. gebrakan jokowi memotong rantai mafia migas. 3 november 2013 oleh febrianto eko wicaksono.

dengan perwakilan dari Sonangol EP Angola yaitu *Chairman of Board of Director* Francisco de Lemos Jose Maria dimana penandatanganan itu disaksikan oleh para petinggi kedua negara dimana wakil presiden Indonesia Jusuf Kalla sebagai saksi dari Indonesia dan Manuel Domingos Vicente yang merupakan wakil presiden Angola menjadi saksi dari pihak Sonangol EP Angola di Kantor wakil presiden Republik Indonesia di Istana merdeka jalan Merdekan Utara, Gambir, Jakarta Pusat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 oktober 2014.

Kerangka kerjasama antara Indonesia dan Angola mengacu pada *Framework Agreement* yang telah di sepakati antara PT Pertamina (Persero) dan Sonangol EP Angola. Dalam kerangka tersebut terdapat pengembangan bisnis hulu, proyek kilang petroleum dan petrokimia serta perjanjian kerjasama impor dan ekspor produk kilang, minyak mentah dan gas bumi. Kerjasama ini merupakan kerjasama antara pemerintah dan pemerintah atau dalam dunia hubungan internasional di sebut dengan G to G. kesepakatan ini yang akan menjadi landasan berjalannya kesepakatan-kesepakatan lain antara Indonesia dan Angola di kemudian hari, serta menjadi acuan dalam wacana berdirinya perusahaan gabungan antara Indonesia dan Angola seperti yang telah di wacanakan.⁶³ Hal yang menarik dalam terjadinya kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP Angola adalah presiden Joko Widodo terkesan buru-buru atau setidaknya ingin cepat ditindak lanjuti dengan cepat sehingga menanrgetkan badan terkait (PT Pertamina dan Sonangol EP) untuk segera membentuk gugus tugas untuk keduanya dalam kurun waktu 7 hari setelah *Framework Agreement* ditandatangani.

PT Pertamina (persero) dan Sonangol EP Angola akan mempunyai peran dan fungsi masing-masing dengan di bentuknya gugus tugas. Perusahaan bersama yang telah di wacanakan dimana perusahaan tersebut dapatmerealisasikan berbagai kerjasama untuk melakukan segala bentuk persiapan yang mendetail

⁶³www. PT Pertamina (Persero).com. "PT Pertamina (Persero) –Sonangol jalin kerjasama pengembangan bisnis hulu-hilir migas" 31 oktober 2014

tentang berbagai macam proyek serta pelaksanaannya yang akan disepakati oleh PT Pertamina (Persero) dan Sonangol EP Angola. Kerjasama itu sendiri nantinya mampu membantu Indonesia dalam pemenuhan konsumsi masyarakat Indonesia yang mana konsumsi minyak dan gas di Indonesia terus tumbuh sekitar 8 % per tahun. Hal itu, tidak sepadan dengan produksi minyak yang dihasilkan dalam negeri Indonesia. sedangkan produksi minyak dalam negeri Indonesia yang disampaikan oleh wakil presiden Indonesia Jusuf Kalla yaitu hanya 800 ribu barel per hari. Hasil produksi dalam negeri tersebut tak mampu memenuhi jumlah kebutuhan bahan bakar minyak nasional yang mencapai 1,6 juta barel per hari sehingga membuat Indonesia mau tidak mau mengimport minyak dari Sonangol EP Angola.

Mamit setiawan yang merupakan pengamat energi dari Energi Watch mengapresiasi langkah pemerintah ini, menurut mamit setiawan membeli bahan bakar minyak langsung dari negara produsen yaitu Sonangol EP Angola merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yang baik. Karena hal tersebut akan mengurangi peran mafia minyak. karena selama ini telah dicurigai berbagai peran tender minyak selain itu mamit juga berpendapat jika penandatanganan perjanjian dengan Sonangol E.P sedikit terburu-buru, terlebih mamit setiawan sebelumnya tidak pernah mendengar pembahsan tentang kajian pemerintah tentang impor bahan bakar minyak yang langsung di ambil dari Sonangol EP Angola.

Sudirman Said menteri ESDM saat itu, mengungkapkan bahwa pembelian bahan bakar minyak dari Sonangol EP Angola dapat menghemat kas negara hingga mencapai USD 2,5 juta perhari atau sekitar Rp. 15 triliun pertahun. Rencana lain yang juga akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) adalah membuat kilang minyak di Indonesia. kedua perusahaan BUMN Indonesia dan Angola tersebut akan melakukan *joint venture* untuk merealisasikan berbagai rencana yang telah di buat oleh kedua negara. Badan Administrasi dan Informasi (EIA) yang berasal dari Amerika Serikat telah mencatat produksi minyak yang dihasilkan oleh Sonangol EP Angola mencapai 1,7 juta barel per hari pada tahun

2013. Dalam kebijakan yang telah ditandatangani Indonesia telah disepakati bahwa Indonesia akan mengimpor minyak mentah dari Sonangol EP Angola sebanyak 1 juta barel perbulan. Kebijakan tersebut tentunya tidak terlepas dari iming-iming Sonangol yang akan memberikan potongan harga 15% lebih rendah dari harga minyak dunia.

Kebijakan pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola mulai tidak konsisten. Hal tersebut dengan ditemukannya data pengiriman surat [konfirmasi](#) pada 20 November 2014 yang berjudul '*Counter To The Proposed Contractual Volume 2015*' (lihat lampiran) yang membalas surat permintaan diskon dari pihak PT Pertamina (Persero) Surat dari Sonangol EP ini berisi penegasan bahwa mereka hanya akan memakai harga sesuai pasar atau dengan kata lain tak ada diskon. Hal itu disebabkan oleh keanggotaannya pada OPEC. Hal itu tentunya tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan iming-iming diskon yang telah dieksplorasi oleh pihak pemerintah Indonesia ke media. Bahwa pihak Indonesia akan mendapatkan diskon dan melakukan penghematan anggaran Negara. dan surat tersebut berisi tentang jumlah minyak mentah yang diimpor dari Sonangol EP Angola sebanyak 950.000 barel telah menuju Indonesia.⁶⁴

Kebijakan ini yang awalnya berupa Government to Government berubah menjadi Business to Business. sebenarnya tak ada informasi yang memadai hingga pertanyaan mengapa Indonesia masih meneruskan kontrak pembelian minyak dari Sonangol EP. Namun, hal tersebut di sinyalir akan tetap dilakukan karena akan bertambahnya perjanjian ekonomi Indonesia dengan pihak Sonangol Holding Internasional China yang merupakan pemilik terbesar saham dari Sonangol EP Angola. Kontrak impor minyak mentah dari Sonangol EP Angola tetap dilaksanakan selama enam bulan dari Januari 2015 hingga Juni 2015 dengan jumlah minyak mentah sebesar 950.000 barrel per bulan⁶⁵

⁶⁴[Satrio AN, www.Indonesianreview.com "siluman baru impor minyak"](#). di akses 14 Januari 2016

⁶⁵Kompas.com "petrol dibubarkan, bagaimana nasib impor minyak dari Angola" Rabu 13 Mei 2015

Kebijakan pembelian yang dilakukan Indonesia ini menuai banyak kontroversi pro dan kontra di dalam negeri, PT Pertamina (Persero) dan pemerintah dinilai terlalu cepat mengambil keputusan. salah satu pengamat kebijakan energi Yusri Usman mengemukakan PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian dalam membeli minyak mentah dari Sonangol EP. Yusri usman menilai bahwa minyak tersebut tidak sesuai dengan kilang pengolahan di Balongan. Menurut Yusri, PT Pertamina (Persero) harus menggeser pengolahan minyak Sonangol tersebut dari Balongan ke Cilacap. Menurut Yusri Usman, biaya produksi PT Pertamina (Persero) bertambah. Namun hal ini dibantah VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Wianda Pusonegoro, menurutnya tidak ada kerugian dalam pembelian minyak dari Sonangol, karena jenisnya cocok dengan kilang pengolahan minyak Cilacap. Namun, tidak cocok dengan kilang Balongan.

Sonangol EP dipilih oleh Indonesia sebagai pemasok minyak karena memiliki minyak jenis *heavy crude* yang dibutuhkan Fuel Oil Complex 1 Cilacap bisa didapatkan dari Sonangol EP. Selain itu, Sonangol EP juga menjamin mampu menyediakan minyak mentah dalam jumlah besar. Kontrak pembelian yang dilakukan oleh Indonesia dan Angola awalnya pun hanya enam bulan, terhitung mulai Januari hingga Juni 2015, melalui PT Pertamina Energy Service (PES).⁶⁶ Perlu diketahui bahwa PES merupakan anak perusahaan Petral atau PT Pertamina (Persero) Energy Trading Limited namun setelah petral dibubarkan oleh pemerintah, maka petral mengalihkan aset-asetnya ke PES.⁶⁷

⁶⁶www.ipotnews.com "PT Pertamina (Persero) bantah kontrak pembelian minyak Sonangol merugikan" 5 juni 2015

⁶⁷Kompas.com "bakal gantikan petral, apasih PES" 24 APRIL 2015

BAB V KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga alasan utama mengapa Pemerintah Indonesia melakukan pembelian minyak ke Sonangol EP – Angola. Alasan pertama adalah faktor internal Opini publik dimana pada pengambilan kebijakan pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP – Angola menimbulkan pro dan kontra di beberapa media. Alasan kedua adanya faktor internal politik dalam proses pengambilan kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP Angola yaitu Transisi pemerintahan dari Presiden Soesili Bambang Yudhoyono ke presiden Joko Widodo, pembekuan PT Petral serta keterlibatan Surya paloh menjadi partai pengusung Jokowi, serta penghematan Anggaran BBM yang menjadi faktor internal pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola. Alasan ketiga adalah faktor eksternal ditandai dengan adanya tindakan Angola melalui Sonangol EP dalam melakukan kerjasama pembelian minyak dengan Indonesia. Sonangol EP juga di bantu oleh Sonangol Internasional Holding Limited yang juga bekerjasama dengan PT Surya Energi yang dimiliki oleh Surya Paloh yang menjadi pemberi saran pembelian minyak Indonesia dari Sonangol EP Angola.

Secara garis besar kebijakan Indonesia membeli minyak dari Sonangol EP Angola adalah untuk mengatasi keterbatasan minyak yang ada di Indonesia yang pada oktober 2014 terjadi banyak kelangkaan BBM. selain itu pembelian ini juga membawa dua faktor penting yakni kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik yang terjadi antara Indonesia dan Angola. Dalam dunia Hubungan Internasional, diperlukan setidaknya dua aktor yang saling berinteraksi melintasi batas wilayah negara mereka, baik *state actor* maupun *non-state actor*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berridge, G.R. dan Alan James . 2003. *A Dictionary of Diplomacy, Second Edition*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- D'Hooghe, Ingrid. *Public Diplomacy in the People's Republic of China*. Dalam Jan Melissen (ed). *The New Public Diplomacy*. Basingstoke : Macmillan Distribution Ltd
- Gerschenkron, Alexander. 1962. *Economic Backwardness in Historical Perspective*. London : F.E Preager
- Gie, Liang. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, dan Metodologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mas' oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.
- Meidan, Michal. 2016. *The structure of China's oil industry: Past trends and future prospects*. Oxford : OIES.
- Roy, S.L. 1991. *Diplomasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rupiya, Martin. 2005. *Evolution And Revolution A Contemporaries Of Mitaries In Southern Africa*. United Kingdom : DFID
- Winarno , Budi. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

Jurnal

- Christie, Edward Hunter dkk. 2010. *China's foreign oil policy: genesis, deployment and selected effects*. FIW Research Reports
- Campos, Indira dan Alex Vines. 2008. *ANGOLA AND CHINA A Pragmatic Partnership*. London : CSIS.
- EIA. 2015. *Angola : Country Analysis Brief*. U.S. : Energy International Administration
- Engardio, Pete. 2007. *How China and India Are Revolutionizing Global Business*. New York: McGraw-Hill

- Gomes, Emanuel dan Markus Weimer. 2011 *Education in Angola: Partnership Opportunities for the UK*. London: Chatam House.
- Hong, Zhao 2009. *China's New Energy Diplomacy in Africa: Progress and Problems*. Kuala Lumpur: Institute of China Studies University of Malay.
- Hellstrom, Jack. 2009 *China's Emerging Role in Africa: A Strategic Overview*. Afrika : FOI
- International Energy Agency. 1999. *World Energy Outlook 1999 Insights*. Paris : IEA
- International Energy Agency. 2000. *World Energy Outlook 2000 Insights*. Paris : IEA
- Jian, Zhang. 2009. *China's Energy Security: Prospects, Challenges, And Opportunities*. Washington : The Brookings Institution.
- Koning Tako. 2014. *Angola's Oil Industry - A Century of Progress in Exploration and Production*. Bellaire : Cline & Associates
- Liu, Xuecheng. 2006. *China's Energy Security and Its Grand Strategy*. Muscatine : The Stanley Foundation
- Lucy Corkin. 2011. *China and Angola Strategic partnership or marriage of convenience?*. South Africa : Angola Brief
- Naray, Olivier 2008. *Commercial Diplomacy : A Conceptual Overview*. Hague: 7th World Conference of TPOs.
- Ramos, Maria Iya. 2011. *Angola oil industry operations*. Angola : Osisa
- Scholte, Jan Aart, 2000, "Globalisation, Governace and corporate citizenship" The journal of corporate citizenship.
- Sudjatmiko, Budiman. 2005. *Kebangkitan dan strategi china*. Jakarta: KOMPAS**
- Tan, Xu and Frank Wolak .2009. *Does China Underprice Its Oil Consumption*. Stanford : Department of Economics Stanford University.
- World Bank. 1997. *China 2020: Development Challenges in the New Century*, WashingtonDC: WB
- Zhu, Xiaodong. 2012. *Understanding China's Growth: Past, Present, and Future*. dalam *journal of economic*. vol.26

Internet

Dr. James Tang, 2006. *With the Grain or Against the Grain* diakses dari www.brookings.edu pada tanggal 23 Maret 2016.

Pertumbuhan PDB China diunduh melalui <http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/GDP-growth/Duration-1980--2000> diakses pada tanggal 25 Juli 2015.

Angola Energy Report diunduh melalui <http://www.endofcrudeoil.com/2013/04/angola-energy-report.html>, pada tanggal 23 Maret 2016.

Executive Research Associates.2008 *China In Africa A Strategic Overview*. Diunduh melalui http://www.ide.go.jp/English/Data/Africa_file/Manualreport/cia_11.html diunduh pada tanggal 23 Maret 2016.

Feira,Segunda. 2006. *Angola Atrai Milhares De Potenciais Investidores Chineses* diunduh melalui http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=219292, pada tanggal 23 Maret 2016.

Information of the state council of the people's Republic of China.2007.*China's energy condition and policie*, diunduh dalam <http://en.ndrc.gov.cn/policyrelease/200712/P020071227502260511798.Pdf> pada tanggal 23 Maret 2016.

Ja'far, Marwan. 2011. *Diplomasi Minyak Timur Tengah*. diunduh melalui <http://economy.okezone.com/read/2011/02/16/279/425142/diplomasi-minyak-timur-tengah> pada tanggal 24 maret 2016.

Kabemba, Claude. 2007. *Win win partnership?*, Diunduh dalam <http://www.osisa.org/books/regional/chinese-involvement-angola> , pada tanggal 25 februari 2015.

Zemin, Jiang. 2000.*Programme For China-Africa Cooperation In Economic And Social Development*. Diunduh melalui <http://www.focac.org/eng/ltada/dyjbzjhy/DOC12009/t606797.htm> pada tanggal 25 maret 2016.

Zemin, Jiang. 2000.*Beijing Declaration of the Forum on China-Africa Cooperation*. diunduh melalui <http://www.focac.org/eng/ltada/dyjbzjhy/DOC12009/t606796.htm> pada tanggal 25 maret 2016.

- Smith, Brian. 2008. *Angola becomes Africa's largest oil producer* diunduh melalui <https://www.wsws.org/en/articles/2008/09/ango-s04.html> pada tanggal 25 Maret 2016.
- Chevron Press Release. 2000. *Chevron Starts Production From Angola's First Deep-water Oil Field* diakses melalui <https://www.chevron.com/stories/chevron-starts-production-from-angolas-first-deepwater-oil-field>. Pada tanggal 25 Maret 2016.
- Chinese Foreign Ministry. 2006. *Angola*. diakses melalui <http://china.org.cn/english/features/focac/183584.htm> pada tanggal 25 Maret 2016.
- Clemente, Jude. 2015. *China's Car, Gasoline, and Oil Markets to 2020* diunduh melalui <http://www.forbes.com/sites/judeclemente/2015/03/18/chinas-car-gasoline-and-oil-markets-to-2020/#2d4f3b9d7148>, pada tanggal 25 Maret 2016.
- The 11th five years plan diunduh melalui <http://www.gov.cn/english/special/115yindex.htm> pada tanggal 25 Maret 2016.
- Williams, Paul D. *State Failure in Africa: Causes, Consequences, and Responses*, diunduh melalui https://blackboard.angelo.edu/bbcswebdav/institution/LFA/CSS/Course%20Material/CCSS2323/Readings/STATE_FAILURE_IN_AFRICA_CAUSES_CONSEQUENCES_AND.pdf pada tanggal 25 Maret 2016.
- Lewis, Lloyd R. *Angola Diamond Mining and War*. diunduh melalui <http://www1.american.edu/ted/ice/angola.htm> pada tanggal 25 Maret 2016.
- Seru, Bang. 2012. *10 Perang Saudara Yang Pernah Terjadi di Dunia* diunduh melalui <http://palingseru.com/10695/10-perang-saudara-yang-pernah-terjadi-di-dunia> pada tanggal 25 Maret 2015.
- Jiabao, Wen. 2003. *Four -Point Proposal Of The Chinese Side* . diunduh melalui <http://www.focac.org/eng/ltada/dejbjhy/CI22009/t157583.htm> Pada tanggal 25 Maret 2017.

Lampiran

1. Surat Permintaan Diskon PT Pertamina (Persero) kepada Sonangol EP Angola



PERTAMINA ENERGY SERVICES PTE LTD
201A Orchard Road, #13-04 Mias Asia City Tower A, Singapore 238872
Tel: (65) 6796 1877 Fax: (65) 6796 1487 / 6738 4070 Telex: PG 38246 PGBL
Company Registration Number: 19952017W

Sonangol Asia
3 Temasek Avenue, 31-04, Centennial Tower
Singapore, 039190
Attn. Mr. Luis Manuel

Ref. No: PSM- 39/11/14
Date : 18 November 2014
Page : 1 (one)

Subject: Proposed Contractual Volume for 2015

Dear Sir,

Following our previous tender invitation via email on 29 October 2014, we are pleased to have any supply to our own refinery in Indonesia for the most required Angolan crudes directly from your esteemed company.

This letter is to express our firm intention to purchase the above crude with the conditions as follow:

- Grade : Cabinda Crude Oil
- Period : February to December 2015 Delivery
- Quantity : 1 x 950KB +/- 5% per month.
Additional cargo of 950KB +/- 5% per month subject to mutual agreement
- Delivery : Either FOB Basis or CFR Balikpapan or Cilacap, Indonesia.
- Price : We prefer to use the Average of the Mean of Daily Platts Crude Oil Marketwire quotations for Dated Brent during the Month of Bill of Lading (all days inclusive) minus USD15.00/bbl below the market price.
Price will be reviewed and mutually agreed in May 2015 for Jul - Dec 2015
- Payment : By TT, 30 days after Bill of Lading Date (Bill of Lading Date = Day zero)

Highly appreciate for your cooperation and look forward to having your positive reply in due course.

Best regards,

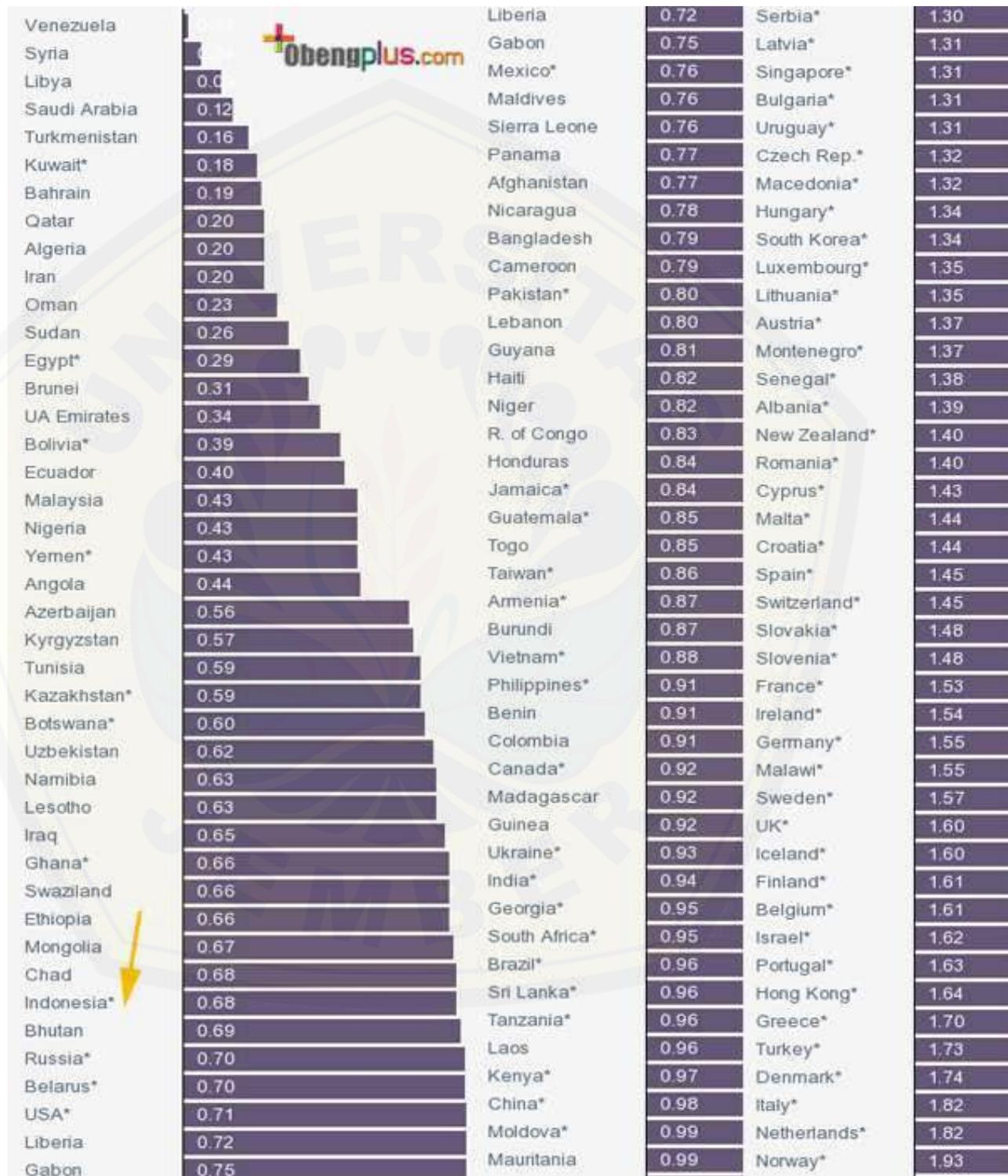
Agus Bachtiar
Head of Trading

C.c. Managing Director/ President - Pertamina Energy Services

2. Surat balasan dari Sonangol EP untuk PT Pertamina (Persero)



3.Perbandingan Harga BBM dunia



4. Artikel Keterlibatan Surya Paloh

bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/07/082157126/Surya.Paloh.dan.Impo

NEWS EKONOMI BOLA TEKNO ENTERTAINMENT OTOMOTIF LIFESTYLE PROPERTI TRAVEL EDUKASI KOLAM

Ekonomi / Bisnis

Surya Paloh dan Impor Minyak Angola

Kompas.com - 07/11/2014 08:21 WIB



Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat acara Harlah PKB ke-16 di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2014). (9/ERUDK)

pp web x G keterlibatan sur x Surya Paloh da x K Surya Paloh d

bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/07/082157126/Surya.Palo

NEWS EKONOMI BOLA TEKNO ENTERTAINMENT OTOMOTIF LIFESTYLE PROPERTI

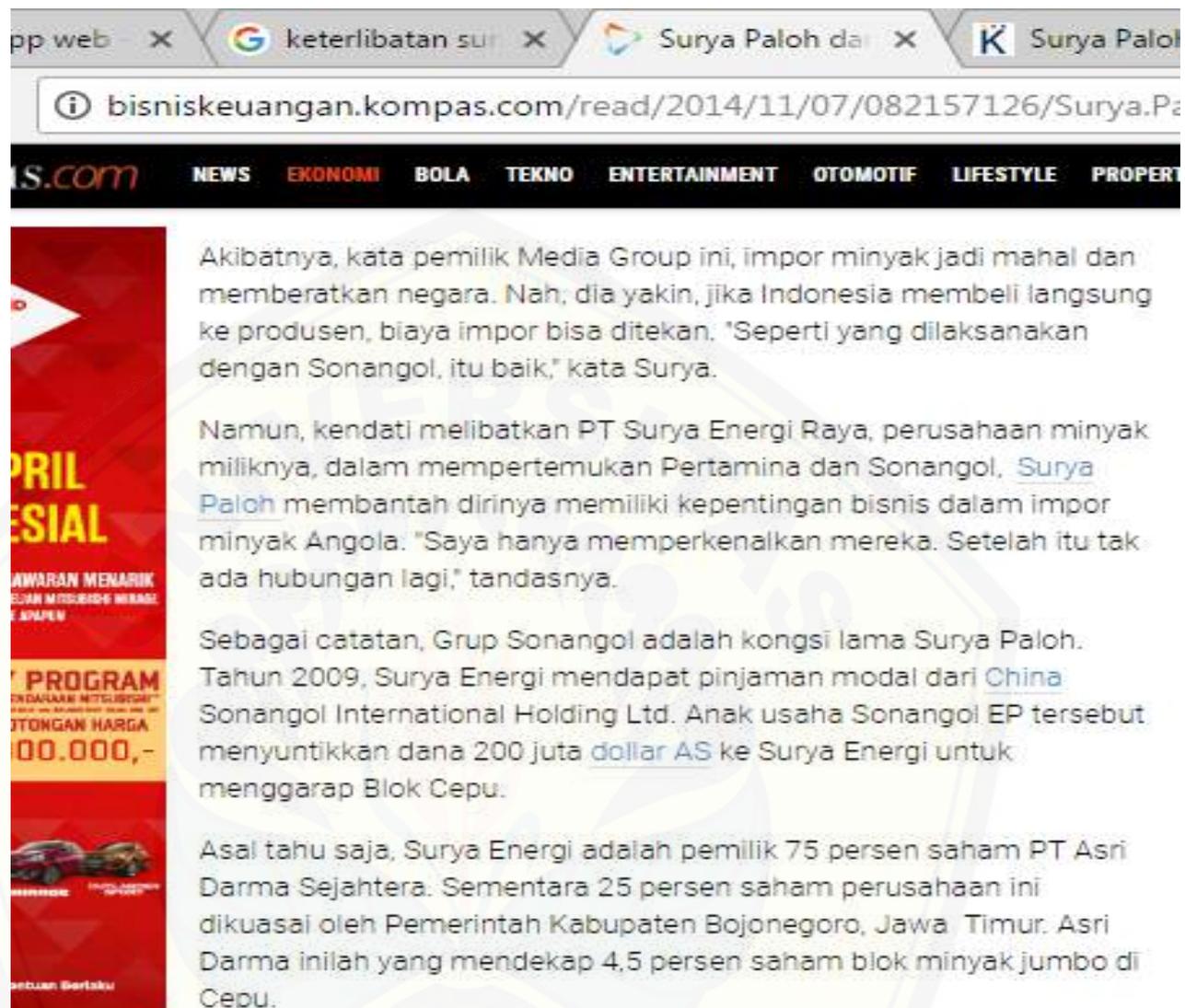
JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Sonangol mungkin tak akrab di sebagian besar telinga kita. Tapi, nama perusahaan minyak milik Angola itu adalah senjata Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatat peran trader dalam impor minyak.

Sebab, Jokowi telah menunjuk Sonangol EP sebagai pemasok sebagian kebutuhan minyak Indonesia, mengurangi peran Petral. Akhir Oktober lalu, kesepakatan itu sudah diteken antara Pertamina dan Sonangol.

Nah, cerita yang bakal seru, Surya Paloh adalah pembisik utama nama Sonangol EP ke telinga Jokowi. Benarkah?

Pendiri Partai Nasdem ini tak menampik. Ia mengakui menyarankan Presiden Jokowi agar Pertamina bekerjasama dengan Sonangol. "Tapi saran kecil saja," ujar Surya kepada Kontan di Kantor Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (6/11/2014), dengan nada merendah.

Surya menyatakan saran itu bertujuan membantu pemerintah baru agar bisa menghemat dari impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM). Maklum, selama ini Pertamina mengimpor minyak melalui pihak ketiga atau trader alias tidak membeli minyak langsung ke produsennya.



The image is a screenshot of a web browser displaying an article from Kompas.com. The browser's address bar shows the URL: bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/07/082157126/Surya.Pa. The page header includes the Kompas.com logo and navigation tabs for NEWS, EKONOMI, BOLA, TEKNO, ENTERTAINMENT, OTOMOTIF, LIFESTYLE, and PROPERTI. On the left side, there is a vertical red banner with yellow and white text, partially visible, mentioning 'PRIL ESIAL', 'AWARAN MENARIK', 'EJAN MUDASIRI MIRAZI', 'JAPAN', 'PROGRAM', 'KONDISI NITROGEN', 'KUALITAS BAHAN BAKAR', 'BETONGAN HARGA', and '00.000,-'. The main content of the article is in Indonesian and discusses the oil import business of Surya Paloh and PT Surya Energi Raya. It mentions that Paloh imported oil from Sonangol, which was a joint venture with PT Asri Darma Sejahtera, a company owned by the government of East Java. The article also notes that PT Surya Energi Raya received a loan from China Sonangol International Holding Ltd. in 2009.

Akibatnya, kata pemilik Media Group ini, impor minyak jadi mahal dan memberatkan negara. Nah, dia yakin, jika Indonesia membeli langsung ke produsen, biaya impor bisa ditekan. "Seperti yang dilaksanakan dengan Sonangol, itu baik," kata Surya.

Namun, kendati melibatkan PT Surya Energi Raya, perusahaan minyak miliknya, dalam mempertemukan Pertamina dan Sonangol, [Surya Paloh](#) membantah dirinya memiliki kepentingan bisnis dalam impor minyak Angola. "Saya hanya memperkenalkan mereka. Setelah itu tak ada hubungan lagi," tandasnya.

Sebagai catatan, Grup Sonangol adalah kongsi lama Surya Paloh. Tahun 2009, Surya Energi mendapat pinjaman modal dari [China Sonangol International Holding Ltd.](#) Anak usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana 200 juta [dollar AS](#) ke Surya Energi untuk menggarap Blok Cepu.

Asal tahu saja, Surya Energi adalah pemilik 75 persen saham PT Asri Darma Sejahtera. Sementara 25 persen saham perusahaan ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Asri Darma inilah yang mendepak 4,5 persen saham blok minyak jumbo di Cepu.

5. Artikel Keterlibatan Surya Paloh

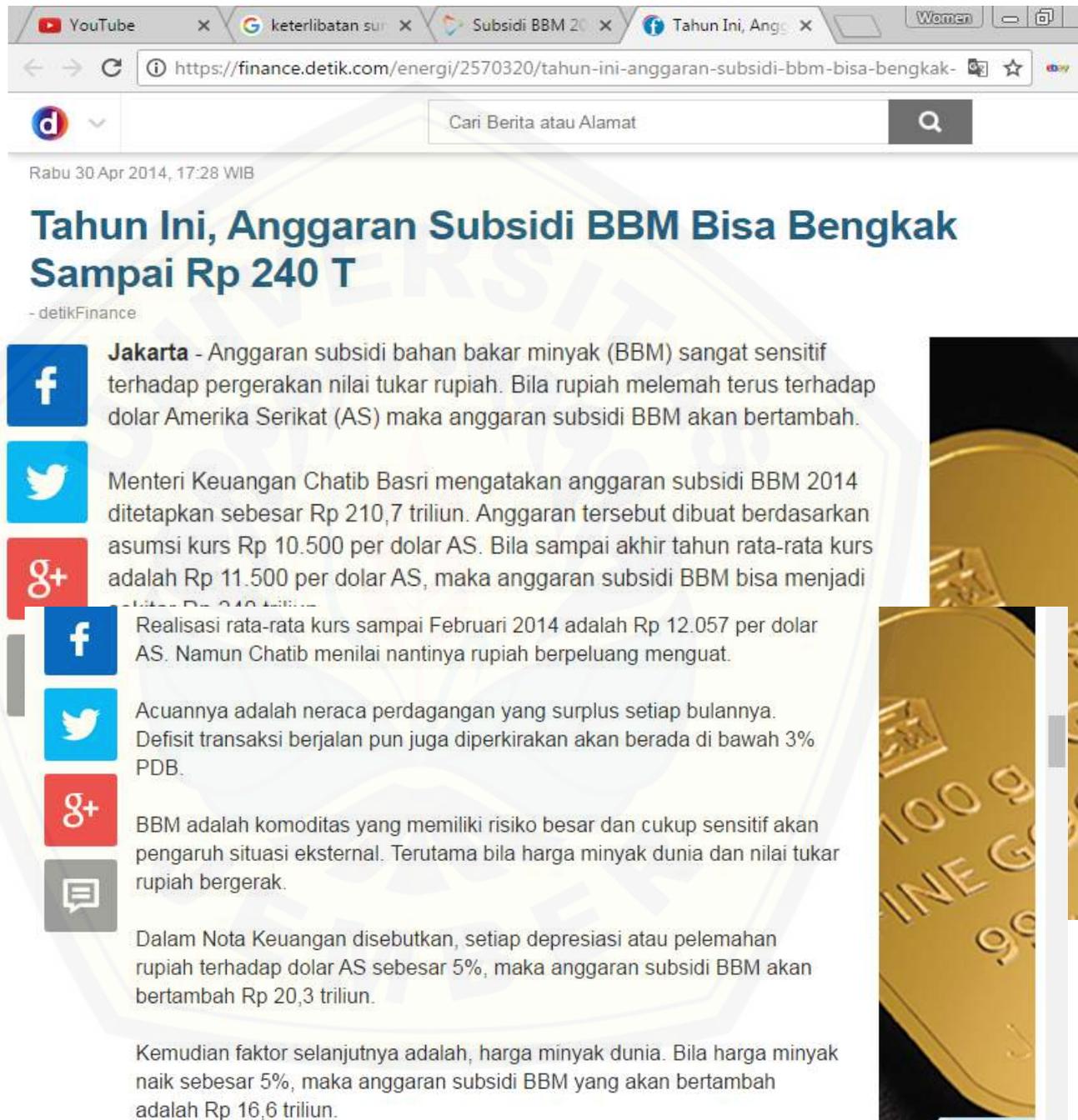


Asal tahu saja, Surya Energi adalah pemilik 75% saham PT Asri Darma Sejahtera. Sementara 25% saham perusahaan ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Asri Darma inilah yang mendepak 4,5% saham blok minyak jumbo di Cepu.

Direktur Utama Surya Energi, Reri Murdijat menyatakan, Surya Energi memang terlibat memfasilitasi kerjasama Pertamina dengan Sonangol. Namun, "Kami tidak memiliki hubungan apapun dalam kerjasama antara Pertamina dengan Sonangol," tandas dia.

Dia menyatakan, kerjasama Surya Energi dengan Grup Sonangol sebatas pada pendanaan proyek Blok Cepu tahun 2009 yang senilai US\$ 200 juta itu. "Saya enggak bisa ngomong lebih detail," jelas dia. Bisnis minyak memang menggiurkan. Mudah-mudahan saja deal bisnis ini tak melahirkan *trader* baru.

6. Artikel Bengkaknya Anggaran BBM Indonesia



The image is a screenshot of a web browser displaying a news article. The browser's address bar shows the URL: <https://finance.detik.com/energi/2570320/tahun-ini-anggaran-subsidi-bbm-bisa-bengkak->. The article title is "Tahun Ini, Anggaran Subsidi BBM Bisa Bengkak Sampai Rp 240 T" and it is attributed to "detikFinance". The date and time are "Rabu 30 Apr 2014, 17:28 WIB". The article text discusses the sensitivity of the 2014 fuel subsidy budget to the exchange rate of the Indonesian Rupiah against the US Dollar. It mentions that the budget is Rp 210.7 trillion based on a rate of Rp 10,500 per dollar. A weaker rate of Rp 11,500 per dollar would increase the budget to Rp 240 trillion. The article also notes that the current rate as of February 2014 is Rp 12,057 per dollar and that the trade balance is in surplus.

Tahun Ini, Anggaran Subsidi BBM Bisa Bengkak Sampai Rp 240 T
- detikFinance

Jakarta - Anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sangat sensitif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Bila rupiah melemah terus terhadap dolar Amerika Serikat (AS) maka anggaran subsidi BBM akan bertambah.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan anggaran subsidi BBM 2014 ditetapkan sebesar Rp 210,7 triliun. Anggaran tersebut dibuat berdasarkan asumsi kurs Rp 10.500 per dolar AS. Bila sampai akhir tahun rata-rata kurs adalah Rp 11.500 per dolar AS, maka anggaran subsidi BBM bisa menjadi Rp 240 triliun.

Realisasi rata-rata kurs sampai Februari 2014 adalah Rp 12.057 per dolar AS. Namun Chatib menilai nantinya rupiah berpeluang menguat.

Acuannya adalah neraca perdagangan yang surplus setiap bulannya. Defisit transaksi berjalan pun juga diperkirakan akan berada di bawah 3% PDB.

BBM adalah komoditas yang memiliki risiko besar dan cukup sensitif akan pengaruh situasi eksternal. Terutama bila harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah bergerak.

Dalam Nota Keuangan disebutkan, setiap depresiasi atau pelemahan rupiah terhadap dolar AS sebesar 5%, maka anggaran subsidi BBM akan bertambah Rp 20,3 triliun.

Kemudian faktor selanjutnya adalah, harga minyak dunia. Bila harga minyak naik sebesar 5%, maka anggaran subsidi BBM yang akan bertambah adalah Rp 16,6 triliun.

7. Artikel Pembubaran Petral



presidenri.go.id/energi/pembubaran-petral-menjadi-kunci-reformasi-tata-kelola-migas.html

 **PresidenRI.go.id**
Presiden Ir. H. Joko Widodo

MENU

PEMBUBARAN PETRAL MENJADI KUNCI REFORMASI TATA KELOLA MIGAS

Dipublikasikan pada 19/05/2015 | 19:57 WIB

Akhirnya, Pemerintah membubarkan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Rencana PT Pertamina (Persero) untuk membubarkan Petral disebut sebagai upaya untuk memperbaiki lagi tata kelola migas negeri ini. Semula, tujuan pendirian Petral adalah untuk menjual minyak hasil produksi Indonesia yang saat itu melimpah. Namun, seiring perkembangan produksi minyak Indonesia yang terus menurun, maka fungsi Petral berubah menjadi pembeli minyak dari luar negeri untuk kebutuhan dalam negeri.

Sebelumnya, banyak pihak berpandangan betapa sulitnya membubarkan Petral. Menurut Faisal Basri, pengamat ekonom sekaligus Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, ada kekuatan besar yang menghalangi pembubaran Petral ini. Sehingga, bertahun-tahun Petral sulit dibubarkan.

Pembubaran itu sendiri melebihi ekpektasi tim anti migas karena bukan hanya Petral saja yang dibubarkan. PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) beserta anak usahanya, Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) dan Zambesi Investments Limited (ZIL) pertengahan Mei lalu (13/5/2015). Langkah pembubaran Petral Grup akan didahului dengan uji tuntas keuangan dan legal serta audit investigasi yang akan segera dilakukan.

Dengan pembubaran Petral, maka kegiatan bisnis Petral Group terutama yang menyangkut ekspor-impor minyak mentah dan produk kilang akan sepenuhnya dijalankan Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC). Pada saat yang sama

dijalankan Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC). Pada saat yang sama Pertamina akan merampungkan perbaikan tata kelola dan proses bisnis yang akan dijalankan oleh ISC. ISC sejak Januari 2015 lalu sudah mulai menggantikan peran Petral. Oleh karena itu, bersamaan dengan program efisiensi lainnya, Pertamina berhasil melakukan efisiensi hingga mencapai 22 juta dollar AS.

Tidak hanya pembubaran Petral saja reformasi birokrasi yang dilakukan. Atas arahan Presiden Jokowi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkapkan, akan membentuk tim investigasi dan tidak ragu melaporkan ke penegak hukum apabila menemui penyimpangan di Petral. Sejak awal, Presiden Jokowi menaruh perhatian khusus untuk Petral. Pasalnya, di masa lalu reputasinya sarat dengan praktek yang tidak transparan.

Komitmen membubarkan Petral adalah salah satu kunci terpenting dalam melakukan reformasi tata kelola Migas yang selama ini berlangsung secara kurang transparan. Dengan membubarkan Petral dan menggantikannya dengan ISC, maka mata publik akan dapat dengan lebih jelas melihat proses yang sedang berlangsung, khususnya dalam hal impor BBM. Termasuk siapa saja, yang terlibat dan diuntungkan dalam proses tersebut.

Hal ini tentu akan membawa dampak yang besar, bukan saja dalam hal efisiensi anggaran Negara – seperti sudah terbukti dengan pembubaran Petral. Lebih dari itu,

agenda pembangunan strategis sebagaimana diamanatkan dalam Nawacita. Termasuk di dalamnya, adalah penggunaan energi gas dan energi baru dan terbarukan (EBT) yang masih melimpah di negeri kita ini.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberi dorongan bagi program reformasi birokrasi agar berjalan lebih cepat. Sebab pembubaran Petral, pada dasarnya memberi pesan penting bahwa hal-hal yang tak mungkin berubah di masa lalu, sangat mungkin berubah di masa kini.

Share this: [f](#) [t](#) [g+](#) [p](#) [e](#)

Tags:

[◀ PREVIOUS POST](#)

[NEXT POST ▶](#)